

-[Laporan Penelitian]-

**EVALUASI PROGRAM MODERASI SOSIAL-KEAGAMAAN
PADA FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB)
KOTA BLITAR DAN RUMAH MODERASI UNIVERSITAS
HINDU NEGERI (UHN) BALI TAHUN 2021**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Kluster

PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Peneliti:

**Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 197906302006041001**

**Dr. H. Abd. Basyid, MM.
NIP. 196009011990031002**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2022**

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Setelah diadakan pembimbingan dan pengujian terhadap laporan hasil penelitian:

N a m a : **Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I., M.Si.**
NIP. : 197906302006041001
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Kategori : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
Judul : Evaluasi Program Moderasi Sosial-Keagamaan
pada Forum Komunikasi Umat Beragama
(FKUB) Kota Blitar dan Rumah Moderasi
Universitas Hindu Negeri (UHN) Bali Tahun
2021

Bahwa laporan hasil penelitian tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022.

Surabaya, 01 September 2022
Reviewer/Pembimbing,



Dr. phil. Khoirun Niam
NIP. 197007251996031004

KATA PENGANTAR

Syukur mendalam terhaturkan ke hadirat Allah swt yang telah memudahkan selesainya penelitian ini. Seiring dengan shalawat ke haribaan junjungan agung Nabi Muhammad saw.

Penelitian berjudul Evaluasi Program Moderasi Sosial-Keagamaan Pada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Blitar Dan Rumah Moderasi Universitas Hindu Negeri (UHN) Bali Tahun 2021 ini diselesaikan pada permulaan situasi normal setelah perkembangan wabah pandemic Covid 19. Tentu ada beberapa hal yang perlu penyesuaian terkait kehidupan kampus dan situasi sosial yang menjadi setting penelitian.

Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Terutama LPPM UIN Sunan Ampel yang telah memiliki judul penelitian ini untuk menerima bantuan penelitian. Selain itu, kami juga sampaikan terima kasih yang mendalam pada berbagai pihak yang membantu selesainya penelitian ini.

Surabaya, 20 September 2022

Dr. Chabib Musthofa, M.Si.

Ketua Tim Peneliti

ABSTRAK

Moderasi beragama menjadi isu utama dewasa ini seiring masih terdapatnya beberapa atraksi yang mencerminkan vandalisme, kekerasan, dan juga radikalisme atas nama agama. Di saat yang sama ada berbagai pihak yang getol mengusung isu moderasi beragama sebagai jargon utama organisasinya. Di antaranya adalah FKUB Kota Blitar dan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa Denpasar Bali dengan Rumah Moderasinya. Penelitian ini terfokuskan pada upaya melihat impact values dari program moderasi beragama dua institusi yang berbeda ini dari perspektif teori evaluasi Michael Scriven dan dengan pendekatan kualitatif. Mengikuti prinsip goal free evaluation versi Scriven, ditemukan program moderasi FKUB Kota Blitar bersifat valuable, curative, dan preventive. Sedangkan pada Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali memiliki social security values dan harmony values. Selanjutnya, dalam perspektif formatif-summatif, ditemukan bahwa program Moderasi di FKUB Kota Blitar juga berstatus valuable dan memiliki institutial values, sedangkan program Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali memiliki nilai creatifity dan inclusivity.

Kata kunci: Moderasi, Program, Evaluasi, Nilai, Agama

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderasi menurut KBBI bermakna dua, yaitu pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman.¹ Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan dalam kehidupan kolektif dengan menerapkan esensi agama dalam bentuk pengejawantahan prinsip pemeliharaan kemaslahatan umum, keadilan, dengan mentaati konstitusi yang berlaku. Moderat biasa juga disebut dalam khasazanah keilmuan Islam dengan *al-tawassuth* atau *al-wasathiyah* (bersikap tengah). Moderasi beragama dewasa ini menghadapi setidaknya tiga tantangan utama. *Pertama*, munculnya kecenderungan memahami agama secara radikal yang dilengkapi dengan kepercayaan bahwa agama harus diejawantahkan secara formal dalam berbagai institusi sosial. Sedangkan di pihak lain juga mulai marak kegandrungan memahami agama secara liberal tanpa mengindahkan aspek normativitas dari teks atau dalil-dalil *naqli* yang bersifat absolut. *Kedua*, munculnya keberanian sebagian pemeluk agama dalam mendeklarasikan kebenaran tafsir subyektifnya atas sebuah teks keagamaan sebagai tafsiran yang terbenar. Kemudian pada saat yang sama tafsir tersebut digunakan untuk melakukan pembacaan realitas sosial tertentu, sehingga melahirkan kesimpulan berdasarkan cita rasa tafsir itu sendiri tanpa mengindahkan penafsiran lain yang boleh jadi lebih absah. *Ketiga*, maraknya gejala memposisikan agama berhadapan secara *vis a vis* dan konfrontatif dengan aspek kehidupan lain seperti negara.²

Agama pada dasarnya mengandung berbagai aturan yang menjadi perangkat normatif bagi pemeluknya agar dapat diyakini dan dipatuhi dalam berbagai ekspresi kehidupan baik secara personal maupun komunal.³

¹ <https://kbbi.web.id/moderasi>.

² Lihat komentar Menteri Agama Republik Indonesia dalam <https://www.kemenag.go.id/read/tiga-tantangan-moderasi-beragama-di-indonesia-orvva>.

³ Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal. 34-35

Ekspresi keberagamaan tersebut dapat berada pada ruang privat maupun publik yang terkait dengan individu lain. Pada pengertian yang berbeda, agama dianggap sebagai produk kreatifitas manusia yang berisi doktrin dan penjelasan atas kekuatan akan yang ilahiyah, dan dengan penjelasan itu pengikutnya berharap keselamatan dan juga kemakmuran secara personal maupun kolektif.⁴

Agama juga memiliki fungsi tertentu bagi pemeluknya, yaitu fungsi laten dan manifes. Fungsi laten dari agama bermula dari besarnya kepercayaan pemeluk agama bahwa keyakinan itulah yang paling benar dalam berbagai halnya secara substantif dan ekspresial, sehingga memandang bahwa agama yang lain tidak dipahami dengan pemahaman yang sama oleh pengikutnya. Tidak ada yang salah dalam hal ini, karena meyakini kebenaran agama adalah tuntutan dari tiap doktrin keyakinan keagamaan, namun yang menjadi persoalan adalah sikap merasa paling benar dalam memahami agama atau doktrin tertentu dan memandang bahwa apa yang dipahami pemeluk lain tidak lebih benar itulah yang menjadi sumber persoalan pada akhirnya. Persoalan yang muncul dari sikap seperti ini adalah sektarianisme dan fanatisme berlebihan yang mampu mendorong pemeluk agama merasa dituntut lebih superior dari pemeluk agama lain dalam berbagai hal. Superioritas ini dalam situasi yang ekstrim menjadi pelegal dari penjajahan kemanusiaan atas nama kebenaran agama. Fungsi manifes agama mencakup tiga persoalan, yaitu doktrin keimanan, ritual, dan norma yang mengikat pemeluknya. Tiga hal tersebut dapat menjadi jembatan bagi upaya bagaimana memahami sebuah agama diyakini dan diekspresikan oleh tiap pemeluknya.⁵

Pada akhirnya, agama menjadi sesuatu yang diimani kebenarannya oleh pemeluknya, lalu dari iman ini agama diterjemahkan menjadi seperangkat aturan yang terejawantah dalam kehidupan sosial pemeluknya. Penterjemahan ini merubah bentuk agama secara substansial menjadi lebih formal dan ekspresial sehingga menjadi sistem nilai dan norma yang menjadi

⁴ D. Hendropuspito, *Sosiologi Ama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000) hal. 34

⁵ Alo Liliweri, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hal. 255

kode etik bagi pemeluknya dalam memahami dan menapaki kehidupan di dunia.⁶

Saat agama yang berada pada kesadaran personal diekspresikan keluar dan bersinggungan dengan kesadaran personal individu lain, maka agama bukan lagi berada pada ruang privat yang lebih bersifat spiritual dan subyektif. Namun agama telah memasuki ruang publik dan menjadi konsumsi Bersama antar pemeluk agama yang sama maupun berbeda. Pada konteks inilah tiap pemeluk agama dihadapkan pada dua sisi yang saling terkait yaitu hak dan kewajiban. Keserasian tiap pemeluk agama dalam menjalankan hak dan kewajiban ketika saling berinteraksi dalam ranah sosial akan melahirkan kerukunan. Sebaliknya, bila terjadi ketidakserasian antara hak dan kewajiban dalam mengekspresikan keberagaman ini akan memicu konflik dan ketegangan di antara mereka. Kerukunan dalam konteks beragama ini di Indonesia terpola dalam tiga bentuk, yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.⁷ Pada konteks inilah keberagaman mengalami tiga tantangan yang telah disebutkan di atas, yaitu radikalisme, subyektifisme, dan konflik.

Kekhawatiran akan tantangan tersebut dikuatkan dengan munculnya aneka pertentangan di tengah masyarakat Indonesia berbasis isu SARA dalam beberapa kurun waktu belakangan. Apalagi dewasa ini konflik atau pertentangan itu tidak hanya terjadi antara pemeluk agama atau suku yang berbeda, namun juga terjadi dalam entitas internal dalam satu agama. Ditambah lagi dengan masih adanya potensi munculnya aliran-aliran kepercayaan baru yang mengklaim kelompoknya sebagai agama baru dengan pengakuan oknum-oknum yang mengaku mendapat misi ilahiyah baru sebagai penerus agama samawi yang diyakini telah sempurna. Bahkan, dewasa ini muncul disparitas berbagai kelompok dengan basis pemahaman keagamaan berbeda yang dikaitkan dengan isu-isu sosial-politik tertentu

⁶ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hal. 29-35

⁷ Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997) hal. 8-10

yang pada akhirnya melahirkan munculnya gerakan massa yang luar biasa massif. Kemunculan fenomena keagamaan ini tentu semakin seru mewarnai wacana kehidupan sosial masyarakat melalui maraknya penggunaan teknologi dan media informasi yang mampu memasuki berbagai lapisan sosial.

Demi mengawal nilai moderat ini pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan mendirikan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang terkoneksi secara institusional dengan pemerintah daerah secara koordinatif dengan tugas menjaga kerukunan dalam keragaman masyarakat Indonesia. Selain itu, juga muncul kelompok-kelompok strategis dengan kemampuan akademis yang mapan dengan fokus melakukan kajian dan berbagai program moderasi di kalangan perguruan tinggi, salah satunya adalah Rumah Moderasi yang pada tahun 2021 dideklarasikan di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa Denpasar Bali. Dua institusi yang berbeda ini tentu memiliki program yang linier dengan tujuan dan fungsinya dibentuk. Tentunya berbagai program tersebut membawa dampak pada kualitas moderasi di lingkungan terdekatnya, atau bahkan berimplikasi secara nasional.

Idealnya, kebijakan publik dirumuskan oleh pihak yang memiliki wewenang yaitu pemerintah, dan diputuskan melalui proses legal-formal, serta ditetapkan berdasarkan persoalan hidup penduduk di kawasan tertentu.⁸ Bila meminjam argumen Michael Scriven yang berpendapat bahwa program yang baik adalah program yang bernilai, maka penilaian terhadap dua institusi yang mengawal moderasi tersebut dapat dilihat dari berbagai program yang dimilikinya. Selain itu, baik-tidaknya sebuah program dapat dilihat dengan dua acara, yaitu secara formatif dan sumatif.⁹ Padahal, pada umumnya di negara yang sedang berkembang masih banyak perdebatan tentang siapa yang layak memegang otoritas terabsah dari proses evaluasi itu sendiri.¹⁰

⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) hal 11-16

⁹ Michael Scriven, *Evaluation Thesaurus: Fourth Edition* (London: Sage Publications, 1991)

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2008) hal. 231

Faktanya, kualitas moderatisme masyarakat Indonesia secara potensial terus mengalami tantangan seiring dengan perkembangan zaman yang sangat dinamis, di satu sisi elemen seperti FKUB dan Rumah Moderasi tersebut lebih menjadi institusi yang mewedahi reaksi dari tantangan moderasi tersebut. Antara tantangan dan kesiapan penjagaan moderasi tersebut tentu tidak seimbang dilihat secara potensial. Nah, pada konteks inilah perlu dilakukan evaluasi program moderasi yang diproduksi secara institusional untuk mengetahui sekaligus membaca ornamen masa depan dari wajah moderasi bangsa ini.

B. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui corak program moderasi FKUB Kota Blitar dan Rumah Moderasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa Denpasar Bali berdasarkan *goal free evaluation* Michael Scriven.
2. Mendapatkan penjelasan tentang evaluasi formatif-summatif terhadap program moderasi FKUB Kota Blitar dan Rumah Moderasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa Denpasar Bali.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana corak program moderasi FKUB Kota Blitar dan Rumah Moderasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa Denpasar Bali berdasarkan *goal free evaluation* Michael Scriven?
2. Bagaimana evaluasi formatif-summatif terhadap program moderasi FKUB Kota Blitar dan Rumah Moderasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa Denpasar Bali?

D. Sistematikan Pembahasan

Laporan penelitian ini disusun dalam beberapa bagian, yaitu:

Bab 1, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2, berisi tinjauan pustaka dan perspektif teoritik yang mendasari tema penelitian ini.

Bab 3, berisi metode penelitian yang mencakup jenis, pendekatan, kawasan, subyek, teknik penggalan data, teknik validasi data, dan teknik analisa data.

Bab 4, berisi deskripsi data tentang program moderasi di FKUB Blitar dan Rumah Moderasi di UHN Bali.

Bab 5, berisi Analisa terhadap komparatif program moderasi di FKUB Blitar dan Rumah Moderasi UHN Bali. Bab ini berisi analisa kasus berdasarkan teori nilai kebijakan publik Michael Scriven yang digunakan untuk melihat profil persengketaan dan dinamika penyelesaian sengketa tersebut.

Bab 6, berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

A. Tinjauan Pustaka

Ada kajian serupa terkait dengan tema penelitian ini, namun ada beberapa perbedaan mendasar yang menunjukkan *gap of research*. Adapun kajian terdahulu itu adalah sebagai berikut:

1. Artikel berjudul *Islam Nusantara: Moderasi Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Ahmad Agis Mubarak, Diaz Gandara Rustam yang diterbitkan pada *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 3, Nomor 2 Tahun 2018 halaman 153-168.¹¹ Artikel ini menjelaskan bahwa konsepsi Islam Nusantara yang didengungkan beberapa waktu lalu merupakan ekspresi dari moderatisme Islam itu sendiri.
2. Artikel berjudul *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia* tulisan Agus Akhmadi yang diterbitkan pada *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol. 13, Nomor 2 tahun 2019.¹² Artikel ini menggunakan metode studi pustaka dari berbagai literatur yang menyimpulkan bahwa moderasi beragama di Indonesia akan tercapai dengan baik bila hal itu disosialisasikan dengan baik oleh semua elemen yang terlibat dalam penyebaran agama itu sendiri.
3. Artikel berjudul *Reinterpretasi Makna Hijrah dan Implikasinya Terhadap Moderasi Beragama: Aplikasi Ma'na Cum Maghza pada QS. Al-Nisa: 100* yang ditulis oleh M. Abdurrahman Al Chudaifi dan Siti Muliana dan diterbitkan pada *Jurnal Moderasi* Vol. 1 No. 1 tahun 2021.¹³ Melalui kajian ilmu tafsir, artikel ini menegaskan bahwa pemaknaan terhadap hijrah menjadi warna utama dalam membentuk sikap moderat seseorang.

¹¹ Ahmad Agis Mubarak-Diaz Gandara Rustam, *Islam Nusantara: Moderasi Islam di Indonesia* dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 3, Nomor 2 Tahun 2018 halaman 153-168

¹² Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia* pada *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol. 13, Nomor 2 tahun 2019

¹³ M. Abdurrahman Al Chudaifi dan Siti Muliana, *Reinterpretasi Makna Hijrah dan Implikasinya Terhadap Moderasi Beragama: Aplikasi Ma'na Cum Maghza pada QS. Al-Nisa: 100* dalam *Jurnal Moderasi* Vol. 1 No. 1 tahun 2021

Berdasarkan penelitian tersebut, ada beberapa perbedaan mendasar. *Pertama*, ketiga penelitian sebelumnya memang memilih moderasi sebagai topik, namun berbeda perspektif dengan penelitian ini. Ketiganya menggunakan perspektif penelitian literatur dan tafsir, sedang penelitian ini menggunakan perspektif evaluasi program. *Kedua*, topik moderasi dikaji pada segmen komunitas secara umum, sedangkan penelitian ini mengarah pada institusi yang terlembagakan. *Ketiga*, penelitian sebelumnya bersifat deskriptif, sedangkan penelitian ini bersifat komparatif eksplanatif.

B. Perspektif Teoritik

Kebijakan publik atau *public policy* merupakan istilah yang kerap didengar, terutama dalam dunia pemerintahan. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*”.¹⁴ Pengertian ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai upaya mewujudkan sebuah ide atau gagasan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di dalamnya ada implementasi berupa langkah nyata, tidak hanya sebatas gagasan. Bila pada satu situasi tertentu pemerintah tidak melakukan sesuatu dalam arti tidak membuat sebuah kebijakan, maka itu juga merupakan kebijakan publik. Karena dengan pemerintah tidak membuat sebuah kebijakan, maka hal itu membawa pengaruh yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Artinya, bahkan tanpa kebijakan pun masyarakat akan mengalami dampak atas satu situasi tertentu.

Mengutip pendapat Parker, Wahab menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau tanggapan atas suatu krisis.¹⁵ Maka dari definisi ini, dapat diketahui bahwa kebijakan publik memiliki cakupan dimensi, sasaran, dan

¹⁴ M. Irfan Islamy. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hlm. 19

¹⁵ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hlm. 46

subyek tertentu. Sebuah kebijakan disandarkan pada persoalan khusus yang menjadi latar belakang dan tujuan tertentu sebagai respon dari pihak yang berwenang atas situasi tersebut. Sebuah kebijakan tidak berdiri sendiri tanpa konteks yang mendasarinya, begitu juga sebuah kebijakan tidak kosong dari tujuan spesifik yang menjadi pertimbangan atasnya. Definisi yang diungkap Parker ini menunjukkan bahwa kebijakan pasti lahir dari situasi darurat yang mempengaruhi kondisi umum dari masyarakat secara luas, sehingga pemerintah berhak melakukan sebuah respon dengan mengeluarkan kebijakan tertentu atas situasi darurat tersebut. Maka dapat dipahami bahwa kebijakan mengandung misi penyelamatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya.

Berbeda dengan dua definisi di atas, definisi lain memiliki batasan pemaknaan yang berbeda. Pendapat David Easton yang dikutip Agustino memberikan definisi bahwa kebijakan publik merupakan *“the autorative allocation of values for the whole society”*.¹⁶ Tampak bahwa definisi ini lebih menekankan pada otoritas pemerintah sebagai kuasa pembuat kebijakan. Pengertian David Easton tersebut menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik atau dalam hal ini pemerintah yang secara sah saja dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya. Otoritas untuk melakukan sesuatu atau tidak itu menjadi pilihan pemerintah yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Pengalokasian nilai inilah yang disebut dengan kebijakan. Mengapa pemerintah memiliki wewenang untuk membuat sebuah kebijakan, karena pemerintah termasuk ke dalam *“authorities in a political system”*. Artinya, para penguasa adalah mereka yang berada dalam sistem politik tertentu, dan terlibat dalam urusan sistem politik yang sah, dan memiliki tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu. Pada posisi inilah kemudian pemerintah pada satu situasi khusus mereka harus mengambil keputusan dengan otoritas yang dimilikinya tersebut. Keputusan inilah yang di kemudian hari akan diterima, mengikat, dan dilaksanakan oleh sebagian besar anggota masyarakat selama jangka waktu tertentu. Maka definisi ini menjelaskan betapa dekatnya politik

¹⁶ Leo Agustino. *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006) hlm. 19.

dengan kebijakan publik, karena pemerintah sebagai subyek yang lahir akibat satu proses politik yang sah, menjadi pemilik wewenang sebuah kebijakan yang sah di satu Kawasan hukum tertentu.

Beberapa definisi di atas menunjukkan substansi bahwa kebijakan publik memiliki perspektif, tindakan, dan peraturan. Dalam kebijakan pasti ada sudut pandang tertentu (*point of view*) dari pengambil kebijakan atas satu persoalan, situasi khusus, dan masa pemahaman akan depan yang diharapkan. Pada satu kebijakan juga terdapat beberapa tahapan aktifitas (*steps of action*) yang terkait mulai dari perencanaan, penyusunan, pemutusan, implementasi, sampai evaluasi. Sebaik apapun kebijakan publik yang telah dibuat hanya kan menjadi sia-sia jika tidak ada upaya untuk mengimplementasikannya karena tidak akan membawa dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka dari itu implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses kebijakan publik. Maka, satu kebijakan juga terdapat sebuah upaya untuk menjadikannya sebagai keputusan hukum (*regulations*) yang mendasari sebuah kebijakan dapat diterapkan secara proporsional pada satu batasan ruang dan waktu tersebut. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa dalam situasi tertentu.

Berangkat dengan konsep tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik pemerintah terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi pemerintah terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Maka dari itu, fungsi pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada titik inilah diperlukan peran dari pihak lain yang harus memainkan peran sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tujuannya agar kebijakan yang dilakukan dapat berjalan secara implementatif dengan maksimal dengan penyelewengan yang sangat

minimal. Bila pemerintah sebagai pembuat sekaligus pelaksana kebijakan tidak mendapatkan pengawasan, maka dikhawatirkan terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah itu sendiri.

Secara umum, sebuah kebijakan publik disusun berdasarkan beberapa tahapan. Tahapan itu adalah identifikasi permasalahan, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Pada proses identifikasi, pemerintah melihat adanya masalah tertentu yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut maka pemerintah melakukan sebuah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan tersebut disusun berdasarkan kajian dan berbagai alternatif tindakan yang memungkinkan penyelesaian masalah yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini juga ditentukan berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut bila sudah ditetapkan dan diimplementasikan pada saatnya nanti. Setelah alternatif tindakan dan subyek terkait ditentukan, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan.

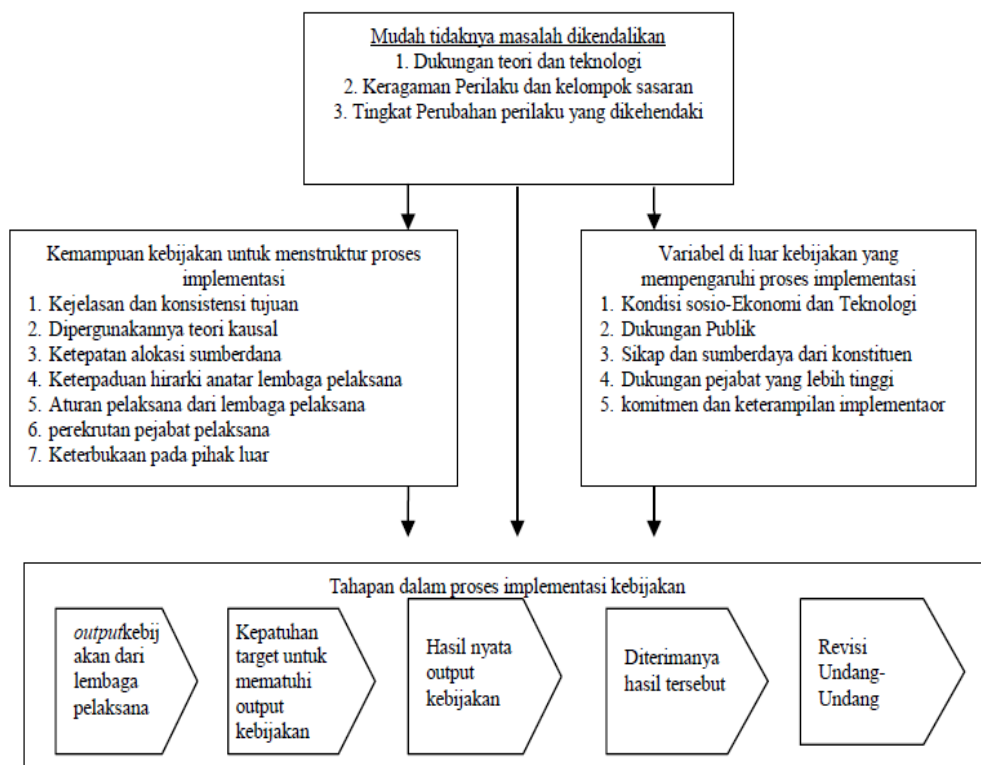
Tahap berikutnya merupakan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip Budi Winarno berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis iuran yang nyata (*tangible output*).¹⁷ Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi kebijakan mencakup tindakan atau tanpa tindakan oleh berbagai agen, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai wujud berbagai tindakan

¹⁷ Budi Winarno. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Madia Pressindo, 2002) hlm. 145

yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.¹⁸ Maka dari definisi ini dapat dipahami bahwa implementasi sebuah kebijakan merupakan praktek nyata dari keputusan pemerintah yang telah tersusun melalui proses yang sah. Titik tekan dari definisi implementasi kebijakan ini adalah mewujudkan aspek normatif yang ada di atas kertas ke dalam wujud praktis dalam tingkah laku secara nyata oleh berbagai pihak yang terkait.

Mengutip Mazmanian dan Sabatier, Suharno menggambarkan sebuah skema pendekatan implementasi kebijakan melalui beberapa tahapan. Pada tahapan itu dijelaskan sampai pada aspek kemungkinan adanya revisi undang-undang.

Gambar 1. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik Versi Mazmanian dan Sabatier.¹⁹

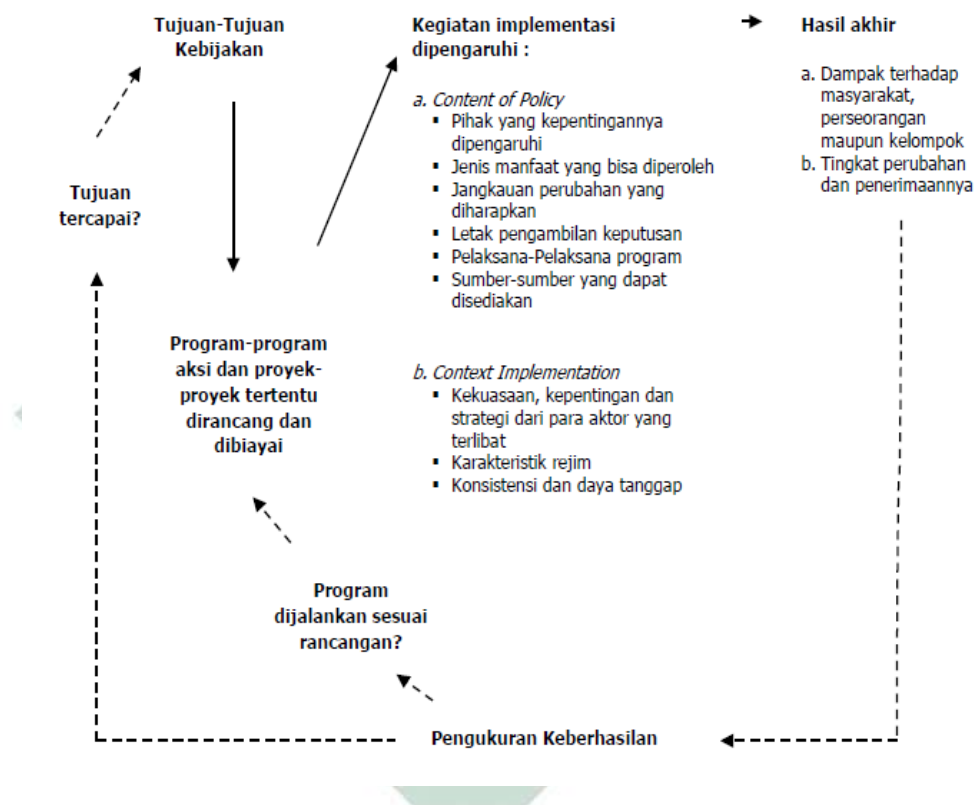


¹⁸ Leo Agustino. *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006) hlm. 139

¹⁹ Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 149

Berbeda dengan yang diajukan oleh Mazmanian dan Sabatier tersebut, Miriam S. Grindle yang dikutip Abdul Wahab menggambarkan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konteks kebijakan dan konteks implementasi itu sendiri, di mana karakter pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan sebuah kebijakan sangat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan.

Gambar 2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Versi Miriam S. Grindle.²⁰



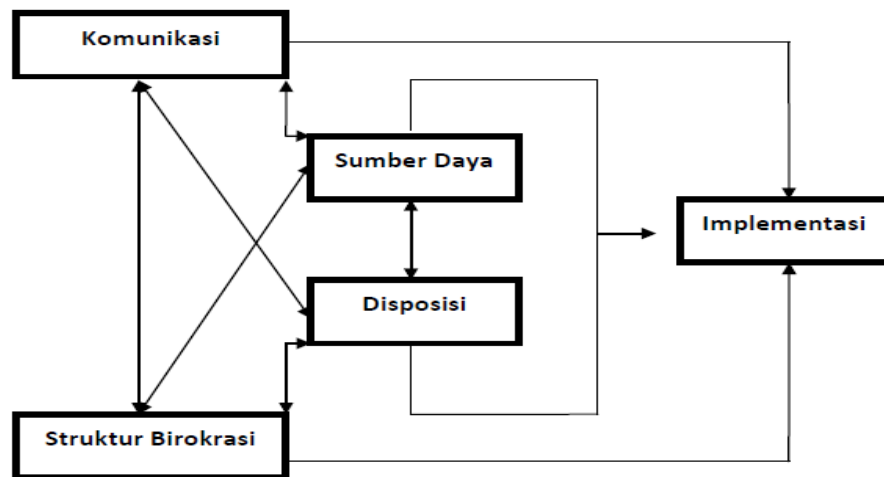
Pandangan yang berbeda juga diungkapkan oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tiap variabel yang terkait dengan kebijakan itu sendiri. Variabel yang sangat menentukan adalah pemerintah, pihak terkait dan juga mekanisme pelaksanaan sebuah kebijakan dalam tataran praktis. Struktur birokrasi, komunikasi, sumberdaya, disposisi yang muncul dari sebuah kebijakan sangat menentukan pelaksanaan sebuah kebijakan. Maka pada aspek inilah *standart operating procedure* (SOP) menjadi sangat menentukan

²⁰ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) hlm. 180

maksimalnya sebuah kebijakan dijalankan oleh sebuah pemerintahan kepada rakyatnya.

Gambar 3. Pendekatan Implementasi Kebijakan Versi George C. Edwatd

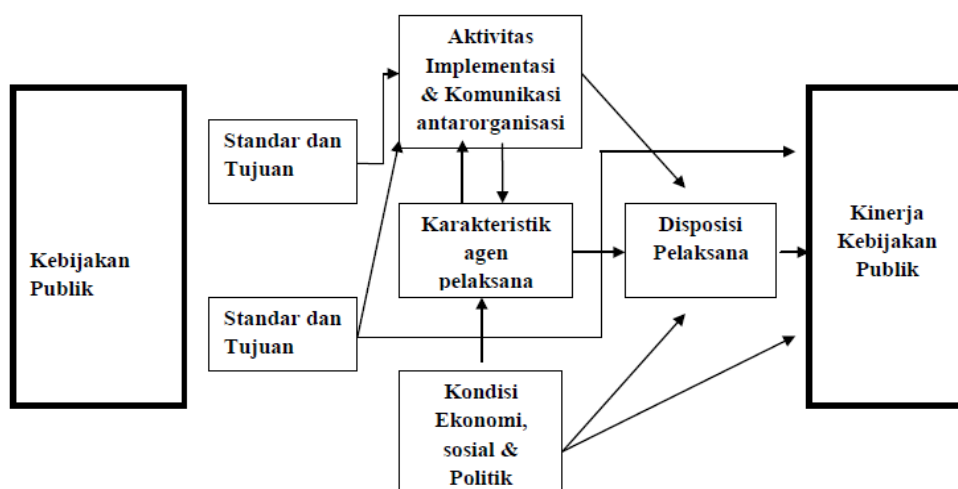
III.²¹



Pola relasi agen pelaksana kebijakan yang lebih variative juga dijelaskan oleh Van Mettern dan Van Horn. Keduanya menjelaskannya melalui sebuah skema yang mengungkap bahwa setting situasi, karakter agen pelaksana kebijakan, dan pola komunikasi antar agen pelaksana menentukan kinerja dari sebuah kebijakan tertentu.

Gambar 4. Pendekatan Implementasi Kebijakan Versi Van Mettern dan Van

Horn.²²



²¹ Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 150

²² Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 144

Setelah implementasi kebijakan dilakukan, maka kaprahnya tahap berikutnya adalah evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Pertanyaan mendasar yang biasanya timbul dalam evaluasi antara lain adalah bagaimana kemangkusan dan kesangkalan kebijakan, siapa yang terlibat, apa konsekuensi implementasi dan apakah ada tuntutan untuk mencabut atau mengubah kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai upaya yang berisi perkiraan atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi yang terkait dengan poin capaian penting dari sebuah program, serta implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut.²³ Maka dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional sekaligus substansial, bukan hanya merupakan kegiatan yang bersifat formalitas. Artinya evaluasi kebijakan secara ideal tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan berbagai masalah yang mendasari atau melatar-belakangi kebijakan, berbagai program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi atau pelaksanaan kebijakan tersebut secara nyata, maupun pada tahap dampak kebijakan yang terjadi di tengah masyarakat dengan situasi dan kondisi tertentu.

Lebih jauh, Suharno menyatakan bahwa ada tiga pendekatan utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu *pseudo evaluation*, evaluasi formal, dan evaluasi teoritis.²⁴ Tiga pendekatan ini menjadi corak utama dalam kajian evaluasi kebijakan yang telah dilakukan secara implementatif, terutama pada kebijakan yang terkait dengan berbagai bidang kehidupan sosial.

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran dan masyarakat dalam skala luas. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa nilai atau manfaat suatu hasil kebijakan akan terbukti dengan

²³ Budi Winarno. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Madia Pressindo, 2002) hlm. 226

²⁴ Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Jogjakarta: UNY Press, 2010) hlm. 243-246

sendirinya serta akan diukur dan dirasakan secara langsung baik oleh individu, kelompok maupun masyarakat.

Di sisi lain, evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif kebijakan. Pendekatan ini berasumsi bahwa tujuan dan target yang telah diumumkan secara formal merupakan ukuran yang paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu kebijakan. Pendekatan ini terbagi ke dalam empat varian diantaranya meliputi: 1) Evaluasi perkembangan, 2) Evaluasi proses retrospektif, 3) Evaluasi hasil Retrospektif, dan 4) Evaluasi eksperimental.

Sedangkan evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan akuntabel tentang hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari pelakunya kebijakan tersebut. Pendekatan ini terbagi ke dalam 2 varian, yaitu penilaian evaluabilitas (*evaluability assessment*) dan analisis utilitas multi atribut.

Akar utama dari teori evaluasi berbasis nilai ini diusulkan oleh Michael Scriven.²⁵ Scriven berpendapat bahwa melakukan evaluasi adalah menilai sesuatu. Kalimat kuncinya adalah “mengevaluasi berarti menilai”. Maka, membahas teori evaluasi dalam pandangan Scriven adalah membahas tentang teori menilai. Menilai berarti memberikan status kemanfaatan dari sesuatu. Manfaat dapat diukur dengan makna yang dipahami atau dirasakan oleh seseorang atas sesuatu itu. Maka dapat juga ditafsirkan bahwa menilai adalah melihat kemanfaatan dan memaknakan arti urgensi sesuatu.

²⁵ Michael Scriven, *The Logic Evaluation*, Edge Press, 1981

Menurut Scriven²⁶, dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi nilai dan tujuan program. Evaluator lebih dituntut memperhatikan cara bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang sebenarnya tidak diharapkan) dari program.

Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum. Jika pencapaian berbagai tujuan khusus itu tercapai, akan tetapi tidak mendukung tujuan umum dari sebuah program, maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya.

Beberapa poin penting yang menjadi dasar dalam teori menilai atau memaknakan dalam pandangan adalah:

1. *Scriven logic as a metatheory of valuing*. Scriven mendasarkan dua hal dalam penilaian atas sesuatu, 1] obyek yang dinilai merupakan sesuatu yang bisa dinilai, dan 2] nilai disusun dalam sebuah framework yang membangun penilaian secara utuh. Logika yang dikembangkan Scriven sebagai seorang penganut realisme dan naturalisme, tidak mengukur aspek yang tidak dapat dilihat secara jelas dan bersifat gradual seperti emosi. *Bare-bones logic* dan *bar-bones form* yang dikembangkan Scriven dalam teori menilai, tidak mampu mengukur dan menjelaskan sesuatu yang didasari oleh emosi. Tindakan emosional dari seseorang dalam memberikan komentar atas sebuah program, dalam pandangan Scriven tidak dapat digunakan sebagai data dalam menilai keberhasilan program tersebut. Tindakan emosional ini dianggap bersifat gradual, tidak logis, dan tidak berdasarkan fakta yang akurat, sehingga tingkat subyektifitas dari tindakan seperti ini menjadi sangat kuat. Scriven menganjurkan sebuah proses yang bersifat logis dan rasional. Pemikiran logis menjadi

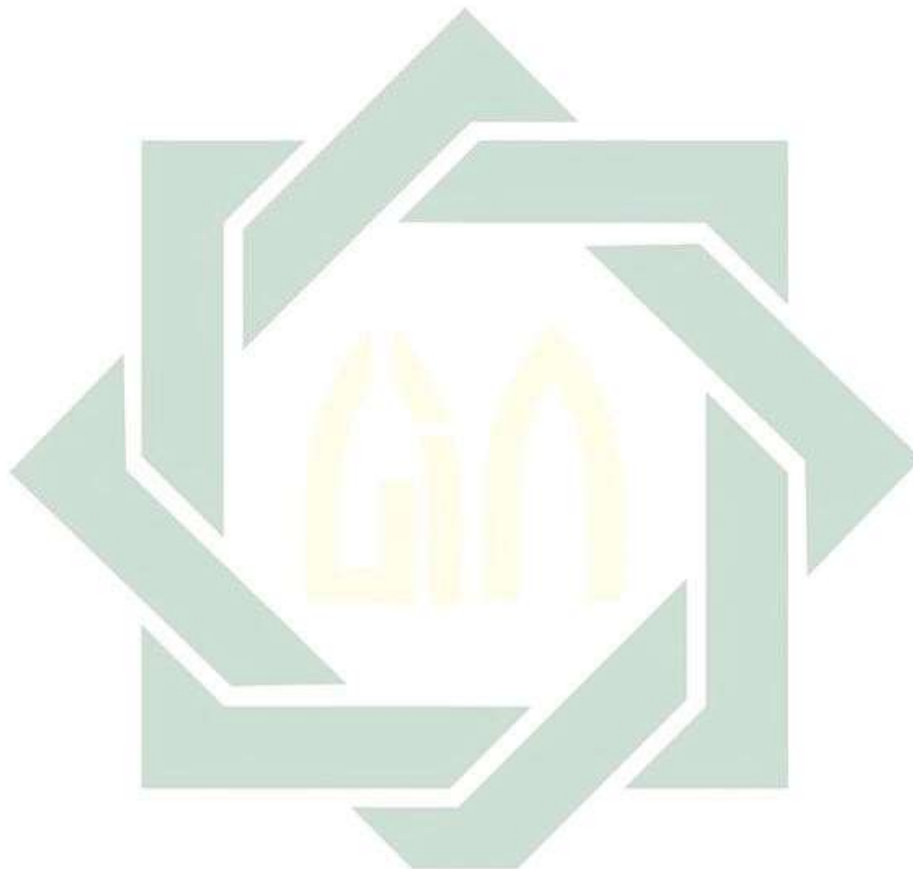
²⁶ Michael Scriven, *Theory and Practice Evaluation*, Edge Press, 1987.

dasar dalam memandu pola pikir dan perspektif menilai sesuatu, sedangkan pikiran rasional menjadi metode untuk menganalisis proses berjalannya sesuatu yang dinilai.

2. *Unpacking the meaning of needs: the logic as prescriptive theory.* *Prescriptive theory* mengklaim bahwa beberapa nilai memiliki prioritas yang lebih tinggi bila dibanding dengan teori lain. Prioritas ini dalam pandangan Scriven dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Dalam berbagai disiplin ilmu, prioritas yang digunakan untuk mengatakan sesuatu menjadi lebih bernilai dibandingkan dengan suatu yang lain sangat tergantung dari cara berpikir yang dianut oleh disiplin dan bidang ilmu itu. Hal ini juga memasuki wilayah kebernilaian dari program. Beberapa program banyak dipengaruhi oleh pertimbangan etik daripada pertimbangan rasional dan realitas yang berkaitan dengan pentingnya program tersebut. Keberpengaruhannya dari hal ini dapat dilihat pada assesmen yang biasa dilakukan di beberapa perusahaan dan berbagai instansi pemerintahan untuk melihat posisi kesiapan sumber daya manusia yang ada di institusi mereka. Variabel seperti IQ, latar belakang keluarga, jenis kelamin, dan keahlian special menjadi pertimbangan yang terkadang lebih menentukan bila dibandingkan dengan kinerja sumber daya manusia tersebut. Dari fakta ini dapat dilihat betapa faktor etik menjadi sangat dominan dalam mempengaruhi penilaian atas sesuatu.
3. *The ambiguity of the public interest.* Kata kunci yang dikembangkan Scriven untuk menjelaskan ini adalah "*public interest*" dan "*common good*". *Public interest* yang menjadi perhatian Scriven ini adalah bagaimana masyarakat umum memiliki sikap atau pendapat atas sesuatu. Pendapat dan kecenderungan sikap publik ini dapat menjadi bagian penting yang dapat digunakan untuk menilai sesuatu atau keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah program. Kelemahan dari kecenderungan publik ini adalah adanya keberpengaruhannya dimensi politik dalam menentukan opini masyarakat tentang sesuatu yang dianggap baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, dan berhasil atau tidak berhasil. Pengaruh kepentingan politik yang mempengaruhi pendapat masyarakat secara

umum ini memang tidak dapat sepenuhnya disalahkakan dalam iklim masyarakat demokrasi, namun hal itu tentu akan menampilkan sesuatu yang tidak semestinya dan lebih bersifat subyektif dalam populasi yang lebih besar. Kelemahan lain dari pendapat tentang “*public interest*” ini adalah tidak kuatnya pemahaman publik atas sesuatu yang dianggap benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan berhasil atau tidak berhasil.

4. *Comparative and absolute standards of performance.* Problem lain yang muncul ketika mengoperasionalkan model berpikir Scriven untuk melihat standar performen dari sumber daya manusia yang ada dalam satu institusi. Model evaluasi sumatif dan formatif menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Scriven berpikir bahwa informasi yang berisi kritik dari kompetitor memperkuat pelaksanaan dari evaluasi formatif. Scriven berusaha menggunakan refleksi dari standar komparasi lebih berperan dalam menghasilkan teori evaluasi.
5. *Problem synthesizing results.* Scriven adalah satu-satunya teoritis evaluasi yang mengatakan bahwa layaknya tiap pelaku evaluasi berusaha menggabungkan berbagai penemuan dalam satu penjelasan, membuat evaluative-judgement yang dapat dipercayai oleh orang yang dievaluasi. Scriven sendiri mengakui bahwa apa yang dikatakannya, pada beberapa kenyataan akan menjadi sangat sulit dilakukan dan sangat sulit terwujud. Scriven juga mengatakan bahwa sangat jarang ada metodologi dalam teori evaluasi atau teori lain yang mampu membantu pelaku evaluasi melaksanakan seperti apa yang Scriven katakan. Metode *cost-benefit* tidak cocok untuk mengimplementasikan pendapat Scriven ini, metode “*weight-and-sum*” juga tidak sulit dilakukan. Teori *Multiattribute utility* atau pendekatan teori pengambilan keputusan di mana *outline* prosedur pengambilan keputusan dengan membedakan berbagai input informasi juga terkadang diadaptasi untuk menterjemahkan pendapat Scriven ini. Namun sejauh itu, Scriven dianggap gagal memberikan apresiasi atas berbagai kesulitan yang dihadapi ketika berusaha mengimplementasikan pendapatnya ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari luas cakupan dan kedalamannya, penelitian terbagi menjadi tiga level, yaitu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif.²⁷ Penelitian adalah usaha mencermati sesuatu dengan menggunakan metode dan teori tertentu.²⁸ penelitian dapat juga dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan metode dan teori. Ada beberapa langkah atau strategi tertentu dalam memilih sebuah penelitian, seperti survey, kepustakaan, riset lapangan.²⁹ Ada juga riset yang disebut dengan *case study* dimana topiknya dipilih secara spesifik berdasarkan pertimbangan tertentu.³⁰

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berusaha melihat komparasi program moderasi yang dilakukan oleh FKUB kota Blitar dan Rumah Moderasi Rumah Moderasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa Denpasar Bali. Secara operasional pendekatan kualitatif dipilih agar dapat membantu melihat dan memahami penerapan kebijakan oleh institusi formal dalam menyikapi persoalan yang diteliti. Penerapan kebijakan pemerintah tersebut tidak hanya dilihat secara formal, namun juga dipahami secara substansial dalam konteksnya yang beragam.

Moderasi beragama merupakan fenomena yang memiliki makna sesuai dengan konteks terjadinya peristiwa tersebut. Memahami sikap atau perilaku moderasi tidak dapat dilihat secara hitam-putih berdasarkan fakta yang terjadi dalam batas-batas realitas empiris yang mampu dilihat secara kasat mata. Namun, hal itu harus dipahami dalam kaitannya dengan

²⁷ Dalam penelitian sosial ada tiga tipe penelitian, yaitu penelitian eskploratori, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatori. Baca : Robert K. Yin. *Case Study Research: Design and Methods*. (London: SAGE Publications.Ins. 1989) hlm. 15

²⁸ Salim, M., dan Salim, K.Y.. *Metode Penelitian Qualitative pada Ilmu Sosial*. (Jakarta : Bina Citra, 1991), hlm. 27

²⁹ Robert K. Yin. *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.Ins. (California, London, 1989). hlm. 17.

³⁰ Robert K. Yin. *Case Study Research: Design and Methods*. (California, SAGE Publications.Ins, London, 1989). hlm. 17

kecenderungan imanensi dari komunitas keagamaan tertentu yang berada dalam lingkaran setting sosial-budaya lokal yang mengitarinya. Kawasan setting sosial-kultural inilah yang memberikan kontribusi nilai dan mandat komunal atas berbagai pihak yang bersengketa.

Maka ketika persoalan agama sudah terimplementasikan dalam aspek kebudayaan secara ekspresif, maka agama tidak bisa dipahami secara murni sebagai ajaran yang genuine diwahyukan oleh Tuhan pada manusia. Akan tetapi agama sudah menjadi bagian dari perilaku manusia yang terkait dengan diri manusia itu sendiri, lingkungan sosial yang mengitarinya, dan sistem serta perangkat kebudayaan yang mewadahnya. Artinya, ketika memahami ekspresi moderasi, tidak bisa dipahami hanya sebagai dua (atau lebih) kelompok yang bersengketa. Namun juga harus dipahami dalam kaitannya dengan berbagai persoalan yang mengitari sengketa tersebut, yaitu kondisi sosial dan budaya.

Bahwa dimensi sosial dan budaya menjadi sangat berkontribusi dalam mewarnai moderatisme tersebut, maka melakukan pemaknaan secara cermat atas hal itu menjadi sangat penting. Sikap moderat tidak dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, namun dipahami sebagai fenomena yang terkait dengan sunia sosial kebudayaan di satu kawasan tertentu. Sehingga satu kasus sikap moderat memiliki kekhususan, spesifikasi dan karakteristik tersendiri. Maka pada titik inilah moderatisme harus dipahami melalui pemaknaan yang cermat secara fenomenologis.

Kualitatif merupakan penelitian yang berupaya mengetahui makna dari balik peristiwa yang dikaji. Maka penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dalam memahami persoalan, mendapatkan data, dan juga melakukan analisis atasnya. Selain itu, kualitatif dipilih bukan hanya bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dibalik program moderasi, namun kualitatif dipilih sebagai perangkat metodologis yang berisi langkah-langkah operasional dari tahapan penggalian data, validasi, sampai analisis. Dasar metodologi dari penelitian ini adalah memanfaatkan satu paradigma atau perspektif teori tertentu untuk memahami realitas yang diteliti.³¹

³¹ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 1997) hlm. 22

Pemilihan jenis kualitatif sebagai metode dan pendekatan penelitian karena beberapa alasan. *Pertama*, jenis penelitian kualitatif memungkinkan terjadinya penelusuran pada aspek-aspek yang tidak tampak dari realitas moderat. Realitas yang tidak tampak ini seperti persoalan keyakinan sebuah komunitas pada agama yang dianutnya, dan juga persepsi satu komunitas keagamaan terhadap komunitas agama lain, terutama dalam hal pelaksanaan ritual keagamaan. Walaupun tidak terlihat, tapi dimensi sentiment keagamaan ini ada dan mendasari sikap serta perilaku komunitas pemeluk agama tertentu dalam tiap persengketaan. Maka kualitatif dapat membantu memahami dimensi ini, sehingga muncul penjelasan tentang koneksi antara persoalan yang abstrak tersebut terkait keyakinan dan sentiment keagamaan dengan persoalan yang kongkrit tentang keberagaman secara ekspresif.

Kedua, topik penelitian yang bersifat dinamis. Moderatisme mengandung latensi konflik antar satu kelompok dengan kelompok lain, baik dalam satu entitas maupun dalam entitas yang berbeda. Konflik memiliki dinamika yang variatif dan memiliki coraknya tersendiri. Hal ini tentu tidak bisa hanya dipahami secara parsial dari satu aspek ruang waktu tertentu secara partikular, namun harus dilihat dan dipahami secara komprehensif berdasarkan urutan peristiwa yang membentuk corak persengketaannya. Dalam menjembatani kepentingan inilah maka kualitatif dipilih agar mampu melihat persoalan program moderasi yang bersifat dinamis dan memiliki latensi tertentu.

B. Kawasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua lembaga yaitu FKUB Kota Blitar dan Rumah Moderasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa Denpasar Bali. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan kekhasan topik dan pengalaman pemegang kebijakan. Unit analisis penelitian ini adalah FKUB dan Rumah Moderasi UHN Bali. Pemilihan dua lembaga yang berbeda ini dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, variasi kasus. Dinamika kerukunan beragama di kedua kota tersebut memiliki perbedaan yang menonjol. FKUB Kota Blitar yang berada dalam kawasan yang ada di daerah Mataraman,

memiliki aneka ragam pemeluk agama yang berbeda-beda, sama dengan kota dan daerah lainnya. Namun, kota ini mayoritas ditempati komunitas muslim dan pemeluk agama lain. Variasi moderasi di kota ini paling tidak berasal dari komunitas muslim, Hindu, dan sekte yang mengaku bagian dari agama Kristen. Berbeda dengan Rumah Moderasi UHN Bali yang berada dalam komunitas mayoritas Hindu dengan klaster kelompok lain lebih minor. Variasi inilah yang mendasari pemilihan dua lembaga tersebut sebagai unit analisis penelitian untuk mendapatkan gambaran komparatif atas sengketa, dan penyelesaian berdasarkan kebijakan yang ada.

Kedua, alasan sosio-kultural. Kota Blitar dan Bali memiliki situasi sosio-demografis yang berbeda, di samping secara geografis tentu sangat berbeda. Variasi sosio-kultural masyarakat Kota Blitar dan Bali juga sangat berbeda. Blitar menjadi kawasan di mana budaya mataraman yang menjunjung hierarki sosial secara stratifikatif maupun diferensiatif, sistem relasi patron-klien, dan kuatnya genggam nilai etika Jawa dalam kehidupan sosial. Situasi ini secara langsung mempengaruhi model moderatisme di dalamnya. Berbeda dengan Bali sebagai daerah yang lebih homogen dari Kota Blitar. Maka konteks sosio-kultural yang mengitari moderatisme menjadi penguat pemilihan kedua lokasi tersebut.

C. Subyek Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah peristiwa, dokumen yang merekam proses implementasi kebijakan, serta pemahaman dan pemaknaan subyek atas program moderasi kedua institusi tersebut. Peristiwa yang dimaksud adalah fakta program yang terjadi di FKUB Kota Blitar dan Rumah Moderasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa Denpasar Bali. Maka informasi yang dibutuhkan adalah keterangan orang yang terkait langsung dengan program moderasi di kedua lembaga tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah operasional yang bertujuan mengkoleksi data yang dibutuhkan oleh satu jenis penelitian.³² Sumber data penelitian ini adalah peristiwa, dokumen yang merekam program moderasi. Maka penelitian ini memilih observasi, dokumentasi, dan *in depth interview* sebagai teknik penggalan data dengan tujuan agar mampu mendapatkan keluasan dan kedalaman data yang dibutuhkan. Pembuatan *field-note* dilakukan untuk mencatat proses pengamatan di lapangan, dan penyusunan draft wawancara semi terstruktur dilakukan untuk menjamin reliabilitas penelitian. Kompilasi data yang bersifat dokumen baik berupa naskah, berita, maupun data yang bersifat audio-visual dilakukan seiring dengan pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara mendalam.

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

Waktu Agenda	I				II				III				IV				V				VI			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Preliminary research																								
Penyusunan proposal																								
Pengumpulan proposal																								
Penilaian dan Persetujuan																								
Pengumpulan alat dan bahan																								
Penelitian																								

³² W. Lawrence Neuman. *Basics Of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches* (Pearson, Pearson Education Ltd, 2007)

upaya melakukan komparasi kritis terhadap tiap data yang dikumpulkan melalui teknik penggalan data yang berbeda dalam berbagai topik.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan pada saat penggalan data.³³ Maka analisis data tentang implementasi pasal 13, 14, 18, 19, dan 20 dari PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 oleh subyek pada riset ini dilakukan bersamaan pada saat penggalan data dilakukan. Sebagai analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan *goal frre evaluation* yang dikembangkan Michael Scriven dan analisis kelompok. Teknik ini berusaha melihat bukti-bukti kegunaan dari kebijakan pemerintah yang diteliti. Dalam analisis juga digunakan teknik *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan beberapa ahli terkait tema penelitian.

³³ Anselm L. Strauss. *Qualitative Analysis for Social Scientists* (San Fransisco: Cambridge University Press, 2003)

BAB IV

PROGRAM MODERASI FKUB KOTA BLITAR DAN RUMAH MODERASI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS (UHN IGB) SUGRIWA DENPASAR BALI

A. Program Moderasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Blitar

1. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri

Masyarakat Kota Blitar yang memiliki corak heterogen dengan berbagai varian perbedaan sosial seperti agama, profesi, latar belakang suku, dan variable lain, memiliki potensi konflik yang cukup besar. Potensi konflik ini terkait dengan pendirian rumah ibadah yang kerap menyisakan persoalan ketika satu kelompok pemeluk agama tertentu memaksakan keinginannya mendirikan rumah ibadah agamanya di tengah komunitas pemeluk agama lain yang potensial menimbulkan konflik sosial. Potensi lain dari aspek ini adalah ketika satu kelompok agama atau kepercayaan tertentu melakukan penyelewengan dalam proses pengajuan ijin atau pembangunan rumah ibadahnya, sehingga menyinggung dan mengganggu kelompok pemeluk agama lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik horizontal berkepanjangan.

Salah satu ikhtiar FKUB Kota Blitar dalam mengantisipasi sekaligus memitigasi konflik antar agama ini adalah dengan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam pandangan FKUB Kota Blitar, PBM ini menjadi sangat penting disosialisasikan guna mengantisipasi konflik sosial akibat kurangnya pemahaman pemeluk agama dalam konteks pendirian rumah ibadahnya. Selain itu, sosialisasi PBM tersebut menjadi penguatan pengetahuan

masyarakat Kota Blitar terkait beberapa hal yang dapat menjadi pemicu konflik sosial.

Ambil contoh terkait pendirian rumah ibadah yang tertera pada Pasal 14 PBM tahun 2006 ini, di dalamnya terdapat klausul tentang pendirian rumah ibadah yang meliputi kelengkapan syarat administratif, syarat teknis, dan juga persyaratan khusus. Syarat administratif seperti mengisi blangko isian yang disediakan oleh pemerintah setempat. Syarat teknis seperti menyerahkan surat-surat dari lahan dan gedung yang akan dijadikan rumah ibadah. Sedangkan syarat-syarat khusus meliputi adanya paling sedikit 90 warga setempat yang mengusulkan pendirian rumah ibadah tersebut yang dibuktikan dengan penyerahan KTP, dukungan warga setempat sebanyak minimal 60 orang yang disahkan oleh kepala desa atau lurah, rekomendasi tertulis dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten/kota setempat.

Beberapa syarat ini menjadi penting untuk disosialisasikan pada masyarakat secara umum, sehingga mereka memiliki pengetahuan mendasar yang benar tentang regulasinya, sehingga persoalan sengketa pendirian rumah ibadah mampu lebih diminimalisir dengan peran serta aktif dari masyarakat itu sendiri. Pada konteks inilah FKUB Kota Blitar memandang bahwa sosialisasi regulasi PBM ini menjadi sangat strategis dilaksanakan dalam kaitannya menjaga kualitas moderasi beragama di Kota Blitar.

2. Program Anti Radikalisme Atas Nama Agama

Program lain yang dilakukan oleh FKUB Kota Blitar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas moderasi adalah dengan melakukan upaya anti radikalisme atas nama agama pada masyarakat Kota Blitar. Bentuk program anti radikalisme ini dalam bentuk sosialisasi bahaya radikalisme atas nama agama yang dapat menimbulkan perpecahan dan konflik vertikal maupun horisontal yang berkepanjangan. Pada kegiatan anti radikalisme yang dilaksanakan, FKUB kerap melibatkan petugas dari instansi lain seperti kalangan kampus, tokoh agama, aparat militer dan

kepolisian, serta juga dari instansi pemerintahan yang terkait. Bentuk sosialisasi ini kerap berupa seminar dan pertemuan formal dengan memilih tema-tema tertentu dengan pembicara yang memiliki kualifikasi keilmuan dan kiprah yang tidak diragukan lagi.

Segmen masyarakat yang menjadi sasaran gerakan anti radikalisme ini yang paling strategis adalah kalangan pemuda, yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, pesantren, madrasah, sekolah minggu, dan pasraman. Selain itu juga program ini juga ditujukan pada komunitas umat beragama dengan melakukan presentasi di rumah ibadah mereka atau di sela-sela kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh komunitas agama tertentu.

Selain itu, program anti radikalisme ini juga diwujudkan dalam bentuk melakukan pelatihan atau workshop yang melibatkan kelompok strategis seperti pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan juga organisasi masyarakat. Diharapkan dengan memperbanyak kegiatan bertema anti radikalisme yang melibatkan berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, pemahaman warga Kota Blitar tentang moderasi dan bahaya radikalisme keagamaan akan mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik dalam rangka menjaga harmoni kehidupan sosialnya.

3. Silaturahmi Ke Rumah Ibadah Dan Organisasi Masyarakat

Kegiatan lain yang menunjang peningkatan moderasi beragama yang dilakukan FKUB Kota Blitar adalah dengan mengadakan silaturahmi secara berkala pada komunitas keagamaan tertentu dan organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini, silaturahmi dilakukan secara berkala dan berkelompok oleh FKUB pada sasaran kelompok isu tersebut dengan membawa agenda atau topik pembicaraan tertentu, disamping juga tentu melakukan komunikasi langsung terkait dinamika sosial keagamaan yang sedang terjadi.

Pada kisaran tiap bulan sekali paling tidak FKUB Kota Blitar mendelegasikan beberapa kelompok untuk berkunjung pada organisasi keagamaan atau kemasyarakatan guna membicarakan perkembangan kondisi dan situasi pengikut atau jamaahnya, sehingga di satu sisi FKUB

mengetahui lebih awal tentang situasi riil di lapangan, sedang di sisi lain komunitas tertentu menjadi lebih dekat dengan FKUB dan dapat secara langsung menyampaikan perkembangan yang terjadi dengan jamaahnya. Kunjungan ini tidak hanya dilakukan pada organisasi di kantor atau sekretariatnya masing-masing, namun juga dilakukan pada berbagai rumah ibadah yang ada di Kota Blitar, terutama pada rumah ibadah yang secara sosial dan historikal memiliki potensi serta peluang mengalami konflik sosial.

Secara teknis, silaturahmi ini dilakukan oleh para pimpinan FKUB Kota Blitar dengan melakukan kontak atau persuratan secara administratif pada lembaga atau organisasi yang dituju, lalu melakukan kunjungan secara berkelompok dengan diterima oleh pimpinan atau tokoh lembaga atau organisasi tersebut dengan tema yang menjadi pilihan pembicaraan. Pada kunjungan ini, FKUB Kota Blitar kerap mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait berbagai persoalan dan ada juga yang menyangkut persoalan moderasi. Bahkan tidak jarang juga wakil para ormas tersebut menyampaikan usulan dan kritikan tentang kinerja serta penanganan problem sosial keagamaan yang menjadi ranah garapan dari FKUB.

4. Sosialisasi Moderasi Melalui Media Sosial

Program lain yang menjadi prioritas dari FKUB Kota Blitar adalah melakukan sosialisasi tema moderasi di media sosial. Pilihan program ini menjadi rasional ditetapkan karena media sosial menjadi instrument paling efektif dalam penyebaran gagasan dan pemaknaan di tengah masyarakat yang mengalami pergerakan sangat cepat dalam tiap sendi kehidupannya. Media sosial yang dipilih adalah audio visual seperti televisi, youtube, dan videografis dengan tema-tema tertentu di facebook, IG, dan juga twitter. Selain itu juga media cetak seperti koran, majalah tabloid, dan juga berbagai selebaran. Selain itu, FKUB Kota Blitar juga kerap menyisipkan infografis yang diproduksi terkait penjagaan harmoni sosial keagamaan pada website pemerintahan yang dimiliki Kota Blitar seperti Pemkot dan Kemenag.

Tujuan utama dari sosialisasi melalui media sosial ini untuk menjaga dan meningkatkan kualitas moderasi pada segmen kalangan muda-mudi dan masyarakat umum yang kini tidak bias lepas dari ketergantungan teknologi informasi melalui gadget yang tiap hari mereka gunakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman moderasi dengan adanya berbagai pesan atas sikap radikalisme, separatisme, fanatisme, dan juga fundamentalisme kerap terjadi di dunia media sosial, dan itu mampu memasuki ruang-ruang privat masyarakat secara luas tanpa ada yang mampu menghalanginya. Maka cara yang paling mudah untuk menghadapi ancaman moderasi seperti itu adalah juga dengan mengkampanyekan moderasi di media sosial, sehingga FKUB Kota Blitar memutuskan untuk melakukan kampanye moderasi melalui berbagai media sosial tersebut.

Tentu bentuk dari info yang disampaikan memiliki kekhasan perbedaan dan spesifikasi, walaupun secara substansial memiliki kesamaan. Pesan moderasi yang tertuang dalam pemberitaan media cetak misalnya, tentu sifatnya lebih pada *news* dan bersifat naratif dan deskriptif, sedangkan pesan moderasi yang disampaikan melalui *flyer* tentu bersifat singkat, padat, dan jelas dengan mempertimbangkan aspek apakah instrument itu dapat membawa ketertarikan bagi para pemerhatinya. Hal ini juga tentu berbeda dengan pesan moderasi yang disampaikan pada chanel youtube, facebook, IG dan twitter yang lebih bersifat pesan singkat berupa tulisan atau video dengan akurasi penyampaian pesan yang lebih praktis.

5. Memberikan Kajian Dan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah

Sebagaimana telah sedikit disinggung pada paparan sebelumnya bahwa FKUB Kota Blitar memiliki peran penting dalam menjaga moderasi, terutama terkait relasi antar pemeluk agama. Maka pada aspek ini FKUB Kota Blitar kerap melakukan tugasnya dengan melakukan kajian terhadap tiap usulan pendirian rumah ibadah serta mengeluarkan rekomendasi atas itu sesuai dengan kajian tersebut.

Pendirian rumah ibadah telah menjadi persoalan yang kerap menyisakan persengketaan di antara komunitas pemeluk agama tertentu

di kota Blitar, sehingga hal itu menjadi lebih sensitif dan berpeluang menimbulkan gejolak social yang potensial di masa mendatang. Atas dasar itulah FKUB Kota Blitar sangat berhati-hati dalam menyikapi tiap usulan pendirian rumah ibadah yang diajukan oleh kelompok agama tertentu. Kehati-hatian ini adalah dengan menjalankan regulasi yang termuat dalam PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 terkait peran aparat setempat dalam menjaga kerukukan umat beragama, dan juga tentang pendirian rumah ibadah dan penyelesaian persengketaannya.

Kajian ini dilakukan tidak secara sepihak oleh FKUB Kota Blitar semata, akan tetapi melibatkan berbagai kelompok terkait seperti kementerian agama, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, dan organisasi sosial serta keagamaan yang terkait dengan persoalan tersebut. Kajian atas usulan pendirian rumah ibadah ini juga tidak dilakukan secara sporadis, akan tetapi dilaksanakan secara bertahap dalam batasan tindakan dan waktu tertentu sampai adanya penerbitan rekomendasi secara resmi oleh FKUB Kota Blitar.

Kerap kali, kajian dan terbitnya rekomendasi tersebut sangat dipengaruhi oleh substansi usulan dan situasi yang mengitari usulan tersebut. Pada usulan yang memang sebelumnya sudah memiliki persoalan dengan masyakar setempat, maka diperlukan kajian lebih mendalam dan berakhir pada terbitnya rekomendasi bahwa usulan tersebut tidak disetujui. Akan tetapi pada pengusulan yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan dan tidak memiliki latar belakang dan potensi masalah ke depannya, rekomendasi afirmatif atas usulan tersebut akan terbit. Bahkan pada beberapa kasus, rekomendasi FKUB belum sampai diterbitkan namun di lapangan telah terjadi gejolak sosial atas satu usulan, sehingga FKUB harus melakukan langkah-langkah antisipatif dalam mencegah konflik susulan yang berpotensi akan menyebabkan gejolak dan kerugian yang lebih luas dan besar di masa mendatang. Pada konteks inilah FKUB Kota Blitar kerap melibatkan orang dan organ lain dalam melakukan kajian mendalam serta penerbitan rekomendasi dari usulan pendirian rumah ibadah tersebut.

6. Menyelenggarakan Outbond Antar Tokoh Agama

Program lain yang tak kalah penting adalah melakukan berbagai kegiatan sebagai ajang bertemu dan saling berinteraksi antar tokoh agama, sehingga mereka memiliki pengalaman untuk saling berkolaborasi sebagai sesama agen sekaligus aktor sosial berdasarkan dari representasi organisasi keagamaannya masing-masing. Kegiatan ini tidak direncanakan secara massif dengan perulangan jadwal yang sangat banyak, biasanya dalam setahun dilaksanakan sekali atau dua kali karena pada dasarnya di antara para tokoh agama telah terjalin komunikasi dan interaksi walau dalam ruang-ruang sosial yang lebih formal. Maka dari itu kegiatan *outbond* yang lebih bersifat non formal tersebut tidak banyak dilakukan dalam durasi yang sifatnya marathon, akan tetapi kegiatan ini tetap ada dan menjadi tradisi di FKUB Kota Blitar. Hanya saja pada saat wabah covid 19 melanda, kegiatan ini tidak dilaksanakan atas dasar menjaga keselamatan nyawa manusia itu lebih penting dari misi apapun.

Tujuan utama kegiatan ini adalah makin dekatnya hubungan sosial antara para tokoh agama yang sehari-harinya menjalankan fungsi melayani umatnya masing-masing. Walaupun terkesan hanya merupakan kegiatan yang penuh dengan permainan dan gurauan, akan tetapi dengan momentum inilah para tokoh agama berkesempatan melepaskan atribut sosialnya sebagai elite kelompok agama, dan dapat berinteraksi dengan lebih manusiawi di antara mereka sendiri tanpa embel-embel tuntutan sosial dari kelompoknya masing-masing. Tentunya hal ini diharapkan akan semakin menambah integrasi dan kohesi personal mereka yang akan berdampak pada terciptanya kohesi sosial yang lebih massif oleh umat mereka masing-masing.

7. Pencegahan Konflik SARA Dan Kunjungan Kerja Ke Daerah Lain

Sebagai daerah perkotaan dengan heterogenitas masyarakat dan potensi konflik sosial keagamaan tertentu, Kota Blitar memiliki kekhasan dibandingkan dengan daerah lain. FKUB kota Blitar tentu sudah memiliki dokumentasi akan persoalan konflik ini, sekaligus juga memiliki pengalaman dalam menghadapinya dari tiap periode. Ini sudah bisa

dianggap sebagai prestasi, karena di Kota Blitar kondisi sosial keagamaan warganya relatif aman dan terkendali dalam harmoni sosial yang baik.

Akan tetapi prestasi ini perlu terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Salah satu upaya peningkatan prestasi penanganan konflik sosial keagamaan tersebut adalah dengan melakukan studi banding ke daerah lain dan mempelajari bagaimana daerah lain menghadapi problematika masyarakat di daerahnya, sehingga FKUB Kota Blitar memiliki perbandingan penanganan konflik sosial keagamaan yang beragam dan tidak satu versi yang bersifat lokal. Upaya ini dengan memanfaatkan jaringan komunikasi di antara para FKUB yang tersebar di seluruh Indonesia.

B. Program Moderasi Rumah Moderasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa Denpasar Bali

1. Academic Activity

Rumah Moderasi diresmikan pada Senin, 9 September 2021 oleh rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN IGB) Sugriwa Denpasar melalui forum focus group discussion (FGD). Pada dasarnya, pengusungan topik moderasi tersebut tidak lepas dari ikhtiar kampus Hindu satu-satunya di Indonesia ini menuju *world class university* (WCU), sehingga tema moderasi beragama menjadi arus utama pengembangan kampus ini menuju target tersebut.

a. Focus Group Discussion (FGD)

Program Rumah Moderasi di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah yang berkaitan dengan aspek akademik. Di antara kegiatan akademik dalam hal ini adalah dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti FGD, seminar, dan konferensi. Kegiatan FGD misalnya, menjadi sangat penting dalam memahami peran Rumah Moderasi yang dimiliki UHN IGB Sugriwa Denpasar, karena melalui forum inilah yang menandai pendiriannya untuk mengawal distingsi akademik dari UHN IGB Sugriwa Denpasar yang dipasarkan pada publik secara luas. FGD yang dilaksanakan pada hari Senin 9

September 2021 ini sendiri tidak hanya dihadiri oleh akademisi UHN IGB Sugriwa Denpasar, akan tetapi juga melibatkan *stakeholder* lain di antaranya adalah bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta disertai wakil bupatinya, I Wayan Diar, perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali Ida Panglingsur Agung Sukahet, beserta para tokoh agama dan tokoh masyarakat lain.

Substansi musyawarah terbatas dari FGD ini menegaskan bahwa moderasi beragama yang diusung oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar sebenarnya berdasarkan pada inti ajaran dari agama Hindu itu sendiri yang berupaya mewujudkan harmoni, keselarasan, dan kebaikan bersama antara sesama umat manusia dan alam semesta. Bahwa dalam doktrin Hindu menuntut pemeluknya untuk mampu menebarkan harmoni bukan hanya pada dimensi social, namun juga pada lingkungan yang menjadi habitat hidup umat manusia itu sendiri. Diharapkan dengan penerapan doktrin teologis Hindu ini, Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar mampu mewujudkan kehidupan beragama yang kondusif, tenteram, rukun, dan damai pada tiap segmen kehidupan umat manusia.

Lebih jauh, tuntutan untuk bersikap moderat pada pemeluk agama Hindu bukan hanya berlaku pada sesama umat manusia saja, akan tetapi juga berlaku bagi tiap makhluk ciptaan lainnya. Sehingga seorang pemeluk agama Hindu harus berusaha berbuat baik pada lingkungan sekitarnya yang berupa hewan dan tumbuhan. Salah satu indikator utama dari sikap praktis cara pandang ini adalah tidak melakukan perusakan pada alam dan juga tidak melakukan penyiksaan pada makhluk hidup lain, apalagi dengan sengaja melakukan eksploitasi atau pemusnahan demi pencapaian hasrat personal tertentu. Prinsip hidup diri dalam memandang dan memahami makhluk lain inilah yang menjadi nilai substantif dari Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar.³⁴

³⁴ <https://kemenag.go.id/read/rumah-moderasi-beragama-hadir-di-uhn-bali>

b. Seminar

Kegiatan akademik lain yang menonjol dari Rumah Moderasi di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah keterlibatan lembaga dalam kegiatan seminar dengan topik utama tentang moderasi. Salah satu contoh seminar yang dilakukan pada Selasa, 23 Maret 2022 bertema *Pengembangan Masyarakat Hindu Pada Era Moderasi Beragama*. Pada seminar ini rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar sendiri, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si menegaskan bahwa ciri khas dari agama Hindu adalah sikap cinta damai, maka hal ini menjadi pondasi penting bahwa umat Hindu harus menjadi penopang utama dari gerakan inklusif moderatisme. Bahkan, rektor juga menegaskan bahwa berangkat dengan pemahaman teologis ini, umat Hindu harus mengejawantahkannya secara kreatif dalam upaya riil pada kehidupan nyata di tengah masyarakatnya. Maka misi pengembangan masyarakat yang menjadi garapan dari UHN IGB Sugriwa Denpasar harus menampilkan model pemberdayaan masyarakat yang mengakomodasi pesan-pesan moderasi tanpa harus kehilangan indikator utamanya berupa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.³⁵

Selain itu, contoh lain seperti kegiatan seminar yang diadakan melalui kerjasama dengan kampus lain yaitu UIN Jakarta yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) dengan tema 'Moderasi Beragama dalam Tradisi Agama-Agama di Indonesia' yang dilaksanakan pada Jumat, 26 Juni 2020. Pada kesempatan itu, rektor juga menyampaikan bahwa salah satu bentuk kepedulian agama Hindu pada pembentukan harmoni sosial adalah dengan diperbolehkannya tempat sucinya untuk aktifitas umum. Selain itu, di Hindu juga ada ajaran "*tatwamasi*", yang berarti engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Maknanya, umat Hindu tidak dibenarkan untuk menyakiti orang lain apapun agama dan latar belakangnya karena orang lain tersebut merupakan bagian dari

³⁵ <https://uhnsugriwa.ac.id/berita-ihdn/berlandaskan-moderasi-beragama-rektor-uhn-sugriwa-dorong-pengembangan-masyarakat-hindu/>

dirinya sendiri. Menyakiti orang lain berarti juga menyakiti dirinya sendiri.³⁶

c. Konferensi

Salah satu kegiatan bergengsi yang dihelat oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar dengan mengusung moderasi adalah dengan menyelenggarakan International Conference on Islam, Science, and Technology (ICONIST) pada bulan Agustus tahun 2022. Kegiatan ini sendiri terlaksana sebagai bagian dari kerjasama antara UHN IGB Sugriwa Denpasar dengan UIN Jakarta, yang diawali dengan kunjungan kedua belah pihak untuk pemantapan kegiatan.³⁷

Salah satu yang menarik selain aspek akademik dari kegiatan ini adalah adanya pelepasan satwa langka di area kampus Bangli. Sebenarnya pelepasan satwa langka ini bukan semata-mata untuk memperindah kampus atau untuk melakukan perlindungan pada satwa yang terancam punah. Akan tetapi pelepasan satwa ini terkait dengan ajaran agama Hindu itu sendiri untuk menyayangi binatang, bukan hanya makhluk yang disebut manusia.

Bahwa dalam agama Hindu, semua makhluk berhak untuk disayangi, dilestarikan, dan diperlakukan dengan baik oleh manusia. Maka pelepasan satwa di kampus Bangli itu merupakan penterjemahan sangat nyata dari semangat menebar kasih sayang pada hewan yang menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia, terutama pemeluk Hindu. Selain itu, pelepasan satwa langka tersebut merupakan upaya edukasi bagi para sivitas akademika di UHN IGB Sugriwa Denpasar agar selalu ingat akan semangat dan kewajiban menyayangi makhluk lain terutama satwa yang dilepaskan.

2. *Networking*

Salah satu kegiatan Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar yang sangat penting adalah melakukan jalinan kerjasama dengan

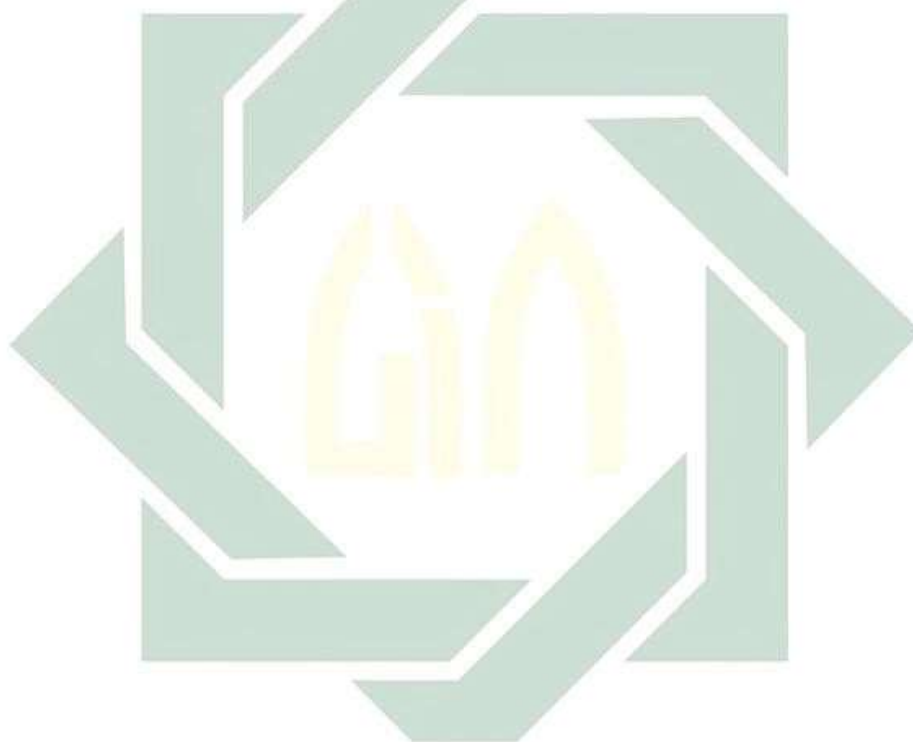
³⁶ <https://kemenag.go.id/berita/read/513586/unit>

³⁷ <https://uhnsugriwa.ac.id/berita-ihdn/uhn-sugriwa-bali-akan-gelar-conference-on-islam-sciende-and-technology/>

berbagai instansi lain dalam melakukan kegiatan. Setidaknya ada dua kerjasama yang sangat strategis dalam penguatan tema moderasi. *Pertama*, kerjasama dengan UIN Jakarta dan IAIN Curup yang tereplikasikan dalam berbagai kegiatan. Bersama UIN Jakarta, UHN IGB Sugriwa Denpasar menggelar berbagai kegiatan seperti seminar, konferensi internasional, dan juga kuliah kerja nyata (KKN) Moderasi Beragama. Lebih spesifik terkait kerjasama KKN Moderasi Beragama tersebut, UIN Jakarta mengirimkan 10 orang mahasiswanya untuk melakukan program KKN di perkampungan yang ada di Bali. Tujuan utama dari KKN Moderasi Beragama ini agar mahasiswa melihat dan mempelajari langsung bagaimana sikap moderat itu dari masyarakat yang memiliki varian keyakinan dan agama yang berbeda. Dalam arti bahwa melalui KKN Moderasi Beragama ini mahasiswa dipersilahkan untuk belajar tentang moderasi bukan lagi dari literature yang hanya bias dibaca, akan tetapi mereka dapat belajar dan mengkonfirmasi secara langsung masyarakat yang menjadi destinasi KKN tersebut.

Tentu pembelajaran moderasi itu tidak hanya berada pada aspek lahiriyah semata, akan tetapi diharapkan mampu menyentuh kesadaran rasional pada diri para mahasiswa tersebut. Kesadaran rasional yang dimaksud adalah pembentukan *akhlakul karimah* sebagai seorang muslim yang ditempa dengan pelatihan di tengah komunitas Hindu yang sama sekali memiliki perbedaan keyakinan dan gaya hidup secara formal dengan peserta KKN Moderasi Beragama. Dapat dibayangkan bahwa program ini akan menjadi inkubator bagi para mahasiswa tentang pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana menjadi saleh spiritual sekaligus saleh sosial di tengah lingkungan komunitas yang berbeda keyakinan keagamaannya. Pada tahap berikutnya kesadaran rasional ini mampu menjadi warna dalam perilaku mereka sehari-hari, yang pada akhirnya mereka mampu menginternalisasikannya pada lingkungan sekitar di mana mereka berada nantinya. KKN Moderasi Beragama ini sendiri dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 yang secara faktual secara resmi dimulai pada hari Jumat, 24 Juni tahun 2022.

Kedua, kerjasama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam hal penguatan moderasi beragama yang itu direplikasikan dalam kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM).³⁸ Kerjasama ini lebih menekankan aspek keterlibatan sivitas akademika kedua kampus dalam penguatan program MBKM yang dicanangkan oleh pemerintah, terutama dalam pelaksanaan aspek tri dharma perguruan tinggi. Bentuknya adalah dengan melakukan pertukaran mahasiswa, dosen, KKN bersama, dan pengembangan program kampus di bidang keagamaan dan ekonomi dalam bidang pemberdayaan masyarakat.



³⁸ <https://www.kemenag.go.id/read/uhn-igb-sugriwa-dan-uin-surabaya-sinergi-penguatan-moderasi-beragama>

BAB V

EVALUASI PROGRAM MODERASI

FKUB KOTA BLITAR DAN RUMAH MODERASI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS (UHN IGB) SUGRIWA DENPASAR BALI

A. Evaluasi Program Moderasi Perspektif *Goal Free Evaluation* Michael Scriven

Berangkat dengan kerangka pemikiran Michael Scriven yang menyatakan bahwa program yang baik adalah program yang memiliki nilai pada sasarnya³⁹, maka mencermati program moderasi yang dilaksanakan oleh FKUB Kota Blitar dan Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali ditemukan uraian sebagai berikut.

1. *Goal Free Evaluation* Atas Program Moderasi FKUB Kota Blitar

Berangkat dengan perspektif Scriven dalam mencermati program moderasi yang dijalankan oleh FKUB Kota Blitar, dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama, valuable program.* Artinya, tiap program FKUB Kota Blitar dalam mengawal misi penguatan moderasi pada segmen wilayah garapannya menyangkut status sebagai program yang pantas untuk dievaluasi. Maknanya, bila dalam pandangan Scriven bahwa program yang pantas atau layak dievaluasi adalah program yang telah memiliki nilai bagi sasarnya, maka program moderasi FKUB Kota Blitar merupakan program yang memiliki nilai penting bagi wajah moderasi di Kota Blitar.

Kedua, curative and preventive values. Nilai penting selanjutnya dari program moderasi yang dijalankan FKUB Kota Blitar bernuansa pada fungsi penyelesaian problem sosial yang terjadi, sekaligus menjadi program yang mampu mengantisipasi konflik sosial yang mengancam moderasi kehidupan beragama. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara periodik seperti melakukan sosialisasi melalui media sosial, FGD dengan stakeholder, melakukan silaturahmi pada tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan bahkan sampai kegiatan yang bernuansa outbond,

³⁹ Michael Scriven, *Theory and Practice Evaluation*, Edge Press, 1987.

memiliki daya kuratif dan preventif dalam penguatan moderasi di Kota Blitar.

2. *Goal Free Evaluation* Atas Program Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali

Sedangkan, bila pandangan Scriven⁴⁰ tentang kemanfaatan sebuah program tergantung dari nilai program tersebut digunakan untuk mencermati program Rumah Moderasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, social security values. Program Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali memiliki kekuatan aspek nilai penjaminan sosial. Hal ini dilihat dari pada saat pendiriannya yang melibatkan stakeholder strategis dari pemerintah setempat, kementerian, dan juga organisasi mitra strategis lain seperti kampus dan FKUB setempat. Melalui keterlibatan para pimpinan lembaga dan organisasi mitra tersebut, maka praktis tujuan Rumah Moderasi yang didirikan akan semakin kuat dengan dukungan lembaga dan organisasi tersebut. Apalagi jika lembaga dan organisasi mitra tersebut membuat kebijakan baru yang linier dengan misi Rumah Moderasi, tentu ini akan menjadi kekuatan tersendiri dari keberadaan Rumah Moderasi tersebut.

Kedua, harmony values. Argumentasi Rumah Moderasi yang mengklaim bahwa doktrin agama menjadi spirit utama dalam mengusung tema moderasi, menjadi kekuatan distingtif tersendiri. Paling tidak narasi dan argumentasi yang dibangun berangkat dari nalar imanensi spiritual agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bersikap baik pada dirinya sendiri, sesamanya, dan juga pada lingkungan sekitarnya, di samping tentu pada Tuhan yang menjadi spirit utama dalam agama. Pada konteks ajaran untuk berbuat baik pada sesamanya dan juga pada lingkungan baik hewan dan tumbuhan serta ekosistem kehidupan secara luas inilah maka Rumah Moderasi Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali menegaskan eksistensi dirinya sebagai lembaga kampus yang memiliki nilai harmonitas istimewa.

⁴⁰ Michael Scriven, *Hard Won Lessons in Program Evaluation*, Jossey-Bass, 1993

B. Evaluasi Formatif-Summatif Program Moderasi

Evaluasi formatif-summatif merupakan evaluasi pencapaian tujuan dari sebuah program yang dicanangkan. Evaluasi formal menggunakan model metode naratif atau deskriptif untuk menghasilkan informasi yang sesuai tentang hasil kebijakan. Di sisi lain dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif kebijakan. Pendekatan ini berasumsi bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan secara formal dan merupakan ukuran yang paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu kebijakan. Pendekatan ini terbagi ke dalam empat varian diantaranya meliputi: 1) evaluasi perkembangan, 2) evaluasi proses retrospektif, 3) Evaluasi hasil retrospektif, dan 4) evaluasi eksperimental

1. Evaluasi Formatif-Summatif pada Program Moderasi FKUB Kota Blitar

Berangkat dengan pendekatan evaluasi formatif-summatif terhadap program moderasi FKUB Kota Blitar, maka didapatkan beberapa penjelasan. *Pertama, valuable program*. Melalui perspektif Scriven tentang nilai atas tujuan program, maka sekian kegiatan yang mengusung tema moderasi FKUB Kota Blitar berada pada status sebagai program yang memiliki nilai penting pada corak moderasi di Kota Blitar. Indikator paling sederhana dari penjelasan ini adalah terlaksananya semua kegiatan tersebut mulai dari silaturahmi, FGD, sosialisasi di media sosial, dan bahkan dari kegiatan informal seperti *outbond* yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, ini merupakan tanda paling mudah untuk menegaskan bahwa kegiatan itu bernilai. Indikator selanjutnya adalah dengan melihat dampak kegiatan moderasi tersebut dalam mengantisipasi dan menyelesaikan konflik keberagamaan di Kota Blitar. Pada pengalaman penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah misalnya, keberhasilan mendampingi pertikaian ini merupakan tanda sederhana dan nyata bahwa kegiatan penguatan moderasi di FKUB Kota Blitar telah berjalan dengan tertata dan nilai kemanfaatannya secara langsung dapat dinikmati secara

nyata. Dua indikator ini menjadi sangat cukup untuk menegaskan bahwa program penguatan moderasi FKUB Kota Blitar melalui beberapa kegiatannya telah secara nyata memberikan nilai positif pada masyarakat setempat. Bahwa pembuktian tersebut tentu tidak kemudian menegaskan dengan jomawa bahwa ancaman moderasi telah hilang, namun paling tidak berbagai kegiatan itu menjadi kegiatan yang memang layak dievaluasi.

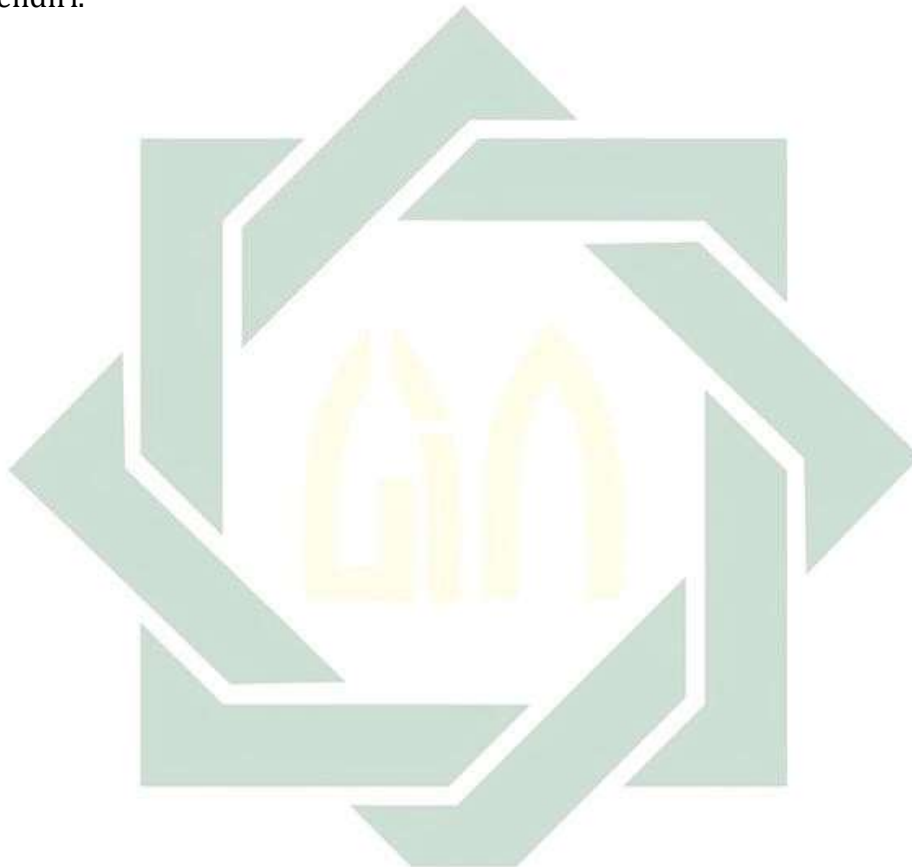
Kedua, institutional values. Diakui atau tidak, berbagai kegiatan moderasi yang dilakukan FKUB Kota Blitar telah membawa dampak yang luar biasa pada instansi pemerintah, organisasi sosial keagamaan, dan tentunya pada struktur relasi social antar individu di Kota Blitar. Dampak ini dapat dilihat dengan keterlibatannya tiap elemen mulai dari instansi pemerintah dan organisasi sosial keagamaan dalam tiap penyelesaian persengketaan yang mampu mengancam mutu moderasi di territorial administratif menjadi tanggung jawab kerja FKUB.

2. Evaluasi Formatif-Summatif pada Program Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali

Sedangkan secara formatif dan summatif, program Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali menegaskan dua hal. *Pertama, creativity.* Tidak dapat dipungkiri bahwa jargon Kampus Kerukunan yang dicanangkan oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali sebelum masa pandemi covid 19, tidak lantas berubah karena dampak wabah. Justru jargon menjadi Kampus Kerukunan tersebut lebih dikembangkan dalam konteks yang lebih besar yaitu dengan mendirikan sebuah lembaga yang disebut Rumah Moderasi. Ini tentu lahir dari kekuatan kreatifitas civitas akademiknya yang mampu mengemas persoalan yang besar menjadi produk kebijakan yang relative maha.

Kedua, inclusivity. Betapa Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali telah berhasil menempatkan doktrin teologinya yang terkesan eksklusif menjadi sangat inklusif dan mampu memasuki ruang-ruang personal dan sangat prihatin melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Salah satu contoh adalah ketika Rumah Moderasi UHN IGB

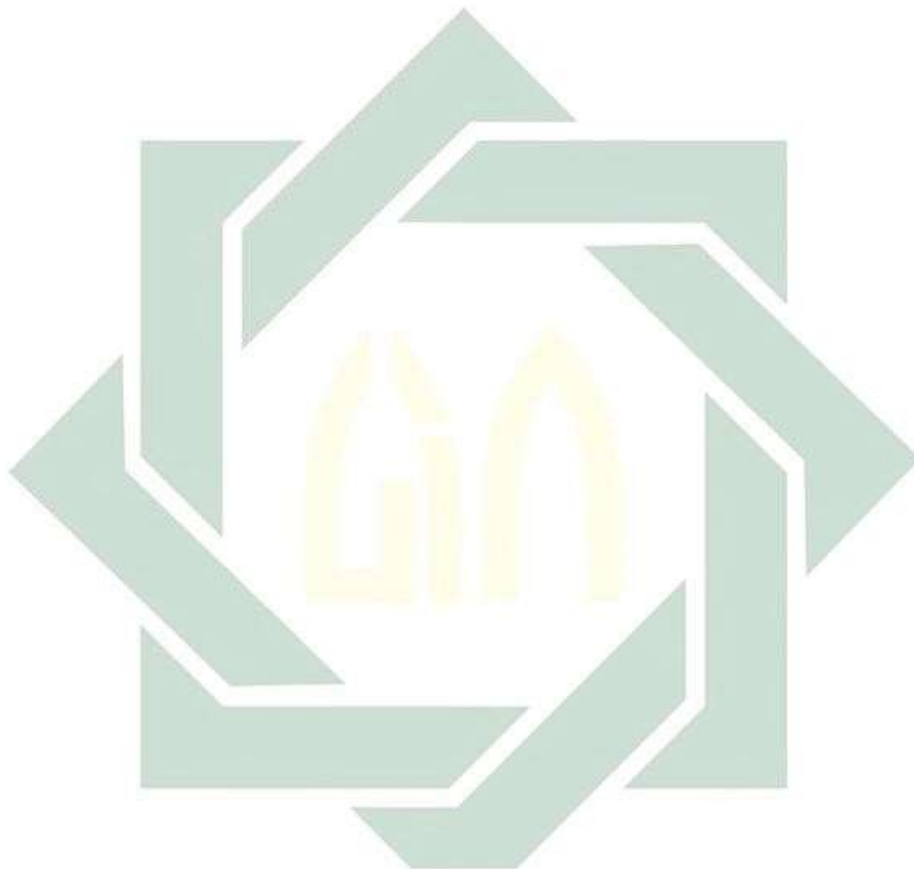
Sugriwa Denpasar Bali membidani adanya kerjasama dengan UIN Jakarta untuk melaksanakan KKN Moderasi dengan datangnya 10 mahasiswa UIN Jakarta sebagai peserta yang melakukan KKN di Bali. KKN Moderasi ini menegaskan bahwa Rumah Moderasi ini sangat serius melakukan gerakan inklusifitas sikap yang disebut dengan moderat. Tentu keseriusan tersebut juga diiringi dengan pembacaan resiko dan peluang yang memberikan berbagai pilihan problem solving sebelum pelaksanaan KKN Moderasi itu sendiri.



BAB V

KESIMPULAN

1. Berangkat dengan perspektif *goal free evaluation* versi Michael Scriven terhadap program moderasi di FKUB Kota Blitar dan Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali, maka didapatkan kesimpulan:
 - a. Program Moderasi di FKUB Kota Blitar berstatus sebagai *valuable program* dan memiliki nilai *curative and preventive program*, dan:
 - b. Program Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali memiliki *social security values* dan *harmony values*.
2. Sedangkan perspektif formatif-summatif terhadap program moderasi di FKUB Kota Blitar dan Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali, maka didapatkan kesimpulan:
 - a. Program Moderasi di FKUB Kota Blitar juga berstatus *valuable program* dan *institual values*, dan:
 - b. Program Rumah Moderasi UHN IGB Sugriwa Denpasar Bali memiliki nilai *creativity* dan *inclusivity*.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi. Agus, *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia* pada Jurnal Diklat Keagamaan Vol. 13, Nomor 2 tahun 2019
- Agustino. Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Agustino. Leo. *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006)
- Ahmad Agis Mubarak-Diaz Gandara Rustam, *Islam Nusantara: Moderasi Islam di Indonesia* dalam Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 3, Nomor 2 Tahun 2018
- Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997)
- Hendropuspito. D., *Sosiologi Ama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Islamy. M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Liliwari. Alo, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- M. Abdurrahman Al Chudaifi dan Siti Muliana, *Reinterpretasi Makna Hijrah dan Implikasinya Terhadap Moderasi Beragama: Aplikasi Ma'na Cum Maghza pada QS. Al-Nisa: 100* dalam Jurnal Moderasi Vol. 1 No. 1 tahun 2021
- Moleong. Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 1997)
- Neuman. W. Lawrence. *Basics Of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches* (Pearson, Pearson Education Ltd, 2007)
- Salim, M., dan Salim, K.Y.. *Metode Penelitian Qualitative pada Ilmu Sosial*. (Jakarta : Bina Citra, 1991)
- Scriven. Michael, *Evaluation Thesaurus: Fourth Edition* (London: Sage Publications, 1991)
- Scriven. Michael, *Theory and Practice Evaluation*, Edge Press, 1987.

- Scriven. Michael, *Hard Won Lessons in Program Evaluation*, Jossey-Bass, 1993
- Scriven. Michael, *The Logic Evaluation*, Edge Press, 1981
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2008)
- Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Strauss. Anselm L.. *Qualitative Analysis for Social Scientists* (San Fransisco: Cambridge University Press, 2003)
- Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Jogjakarta: UNY Press, 2010)
- Winarno. Budi. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogjakarta: Madia Pressindo, 2002)
- Yin. Robert K.. *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.Ins. (California, London, 1989).
- <https://kbbi.web.id/moderasi>. Lihat komentar Menteri Agama Republik Indonesia dalam <https://www.kemenag.go.id/read/tiga-tantangan-moderasi-beragama-di-indonesia-orvva>.



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 247 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2022
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022, perlu dilaksanakan pemberian Bantuan Litapdimas Tahun 2022 UIN Sunan Ampel Surabaya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut, hasil *review* dan Seminar Proposal oleh *reviewer* melalui sistem informasi Penelitian dan pengabdian masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya (SITASA), tanggal 28 – 29 Januari 2022;
- c. mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan sebagai penerima bantuan penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun 2022 UIN Sunan Ampel Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Tahun 2022 dengan klaster judul penelitian dan jumlah bantuan penelitian sebagai berikut:
- a. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Penelitian Dasar Interdisipliner sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini;

- d. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Penelitian Terapan Kolaborasi antar Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Keputusan ini;
- h. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Prodi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
- i. Pengembangan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Keputusan ini;
- j. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-book sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Keputusan ini.

- KEDUA : Pencairan bantuan penelitian yang diberikan kepada masing-masing Peneliti dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus dengan ketentuan telah memenuhi kelengkapan dokumen kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETIGA : Penerima bantuan penelitian wajib melampirkan luaran penelitian sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2022, tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Februari 2022
REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Kepala Biro UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Dekan Fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NO 247 TAHUN 2022
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**PENERIMA BANTUAN
 PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Nama/NIP/NUP	Fakultas	Judul	Jumlah Bantuan
1	Abdul Hakim, MT 198008062014031002 Amrullah, M.Ag 197309032006041001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Studi Pemanfaatan Abu Ampas Tebu Sebagai Substitusi Parsial Semen dalam Campuran Bahan Pembentuk Mortar untuk Pekerjaan Sipil	Rp. 24.000.000,-
2	Hj. Siti Azizah, S.Ag, M.Si 197703012007102005 Amin Tohari, S.Ag, M.Si 197007082000031004	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	MORAL DAN RASIONALITAS DALAM TINDAKAN EKONOMI PEDAGANG ETNIS ARAB, MADURA DAN JAWA DI KAWASAN WISATA RELIGI SUNAN AMPEL SURABAYA (Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens)	Rp. 24.000.000,-
3	Holilah, S.Ag, M.Si 197610182008012008 M. ZIMAMUL KHAQ, M.Si 198212022015031002	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	KIAI DAN BLATER DALAM PILKADA (Studi Pandangan Masyarakat tentang Keterlibatan Kiai dan Blater dalam Pilkada dan Dampaknya terhadap Demokratisasi di Kabupaten Bangkalan)	Rp. 24.000.000,-
4	IDA MUNFARIDA, MT 198411302015032001 SHINFI WAZNA AUVARIA, MT 198603282015032001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	PRODUKSI BIOLISTRIK MELALUI SISTEM MICROBIAL FUEL CELL BERBASIS LIMBAH PADAT	Rp. 24.000.000,-
5	Mukhoiyaroh, M.Ag., Dr. 197304092005012002 Yahya Aziz, M.Pd.I 197208291999031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Motivasi Determinasi Diri dan Kemampuan Akademik Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 24.000.000,-

6	Lucky Abrorry, M.Psi 197910012006041005 Dr. H. Jainudin, M.Si 196205081991031002	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Peran collective Efficacy pada Tim Elit Cabang Olahraga Beregu	Rp. 24.000.000,-
7	Dr. Muflihah, S. Ag., MA 197606122008012027 Drs. H. Sholehan, M.Ag 195911041991031002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Integrasi Pembelajaran Dengan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Telaah terhadap Desain RPS Prodi PBA UIN Surabaya dan UIN Malang)	Rp. 24.000.000,-
8	Siti Rumilah, S.Pd, M.Pd 197607122007102005 Rizki Endi Septiyani, M.A. 198809212019032009	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	Tindak Tutur Masyarakat Terhadap Bahtsul Masail PWNU Tentang Halal Haram Transaksi Kripto pada Media Sosial YouTube (Kajian Sosiopragmatik)	Rp. 24.000.000,-
9	Masadah, M.HI, M.Pd.I 197812052006042003 Ahmadun Najah 197709152005011004	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Akuisisi bank digital asing e-commerce shopee ditinjau dari maqas'id al- shari'ah dan hukum positif (studi kasus pada pt. Seabank indonesia atas bank kesejahteraan ekonomi)	Rp. 24.000.000,-
10	Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag 196912121993031003 Prof. Dr. H.A.Zahro, MA 195506071988031002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pascasarjana	Persepsi Mahasiswa Tentang Literasi Digital Dalam Pembelajaran Fiqh Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Rp. 24.000.000,-
11	Aris Fanani, M.Kom 198701272014031002 Dr. Eng. Anang Kunaefi, M. Kom 197911132014031001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Analisis Tren Kebijakan Climate Change Berbasis Konten Media Menggunakan Algoritma Natural Language Processing Untuk Deteksi Dini Bencana	Rp. 24.000.000,-

12	Dr. Hanun Asrohah, M.Ag 196804101995032002 Dr. Junaedi, M.Ag 196512241997031001	Pascasarjana Pascasarjana	Socio-Physical and Spiritual Environment Model untuk mengukur Pengembangan Moderasi Beragama di Madrasah	Rp. 24.000.000,-
13	Lisanul Uswah Sadieda, S.Si, M. Pd 198309262006042002 Dr. Sutini, M.Si 197701032009122001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL MAHASISWA MELALUI PERKULIAHAN BERBASIS GOOGLE CLASSROOM PADA MATA KULIAH PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) 1	Rp. 24.000.000,-
14	Drs. M. Munir Mansyur, M.Ag 195903171994031001 Dr. Imam Ibnu Hajar, S. Ag., M. Ag 196808062000031003	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Adab dan Humaniora	MODERATISME ISLAM MELALUI KURIKULUM PESANTREN (Studi Pada Pendidikan Karakter di Ponpes Fadlillah Tambaksumur-Waru Sidoarjo dan Ponpes Jawaahirul Hikmah 3 Tulungagung dalam Membentuk Sikap Moderat Beragama Bagi Santri)	Rp. 24.000.000,-
15	Dr. Ries Dyah Fitriyah, M.Si 197804192008012014 NIHLATUL FALASIFAH, M.T. 199307272020122030 Vera Arida, M.Sc 199003192020122017	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Membangun Peta Jalan Penelitian Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dalam Perspektif Integerasi Twin Towers dengan Pendekatan Beneficiary Assessment	Rp. 24.000.000,-
16	Dr. H. Sam 'un, M.Ag 195908081990011001 Novi Sopwan, M.Si. 198411212018011002	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	KONTRIBUSI FIQIH HISAB RUKYAT SAAT PANDEMI DALAM RUKYATUL HILAL AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH 1443 H MELALUI SISTEM TELESKOP JARAK JAUH	Rp. 24.000.000,-
17	Dr. H. Suis, M.Fil.I 196201011997031002 Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag 197110212001121002	Pascasarjana Pascasarjana	PERAN DUA SYAHADAT DALAM PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH (STUDY FALSAFI DALAM PENINGKATAN KEIMANAN KEPADA ALLAH DAN RASUL-NYA DI SURABAYA)	Rp. 24.000.000,-

18	Dr. Sri Wigati, MEI 197302212009122001 NURUL FATMA HASAN, M.E.I. 198907112020122013	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH DALAM UPAYA MENCETAK MAHASISWA YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF	Rp. 24.000.000,-
19	Dr. Umi Hanifah, M.Pd.I 197809282005012002 Dr. Hisbullah Huda, M.Ag 197001072001121001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Implementasi Microteaching Model Fully Online dalam Meningkatkan Kompetensi Mengajar Mahasiswa Calon Guru Bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel	Rp. 24.000.000,-
20	Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI. 197404142008011014 Dr. M. Sulthon, M.A. 197205152006041003	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Pemenuhan Hak Pendidikan pada Anak Binaan di LKPA Blitar pada Masa Pandemi COVID-19	Rp. 24.000.000,-
21	Sulthon Masud, S.Ag, M.Pd.I 197309102007011017 Kusnul Munfaati, M. Pd D11175	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	STEAM ISLAMIC ACTIVITY STORY BOOK BERMUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA	Rp. 24.000.000,-
22	Maunah Setyawati, M.Si 197411042008012008 Agus Prasetyo Kurniawan, M.Pd 198308212011011009 Yuni Arrifadah, M.Pd 197306052007012048	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	PENGARUH PELATIHAN PENGEMBANGAN SOAL NUMERASI BERBASIS ETNOMATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENILAIAN MAHASISWA PMT	Rp. 24.000.000,-

23	Widya Nilandita, M. KL 198410072014032002 Arqowi Pribadi, M. Eng 198701032014031001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	KARAKTERISTIK, KELIMPAHAN DAN EFISIENSI PENYISIHAN MIROPLASTIK PADA IPA SIWALANPANJI KABUPATEN SIDOARJO	Rp. 24.000.000,-
24	Dr.Hj. Nur Fadlilah, M.Ag 195801311992032001 Fathoniz Zakka, M. Th. I 201409006	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Kreteria Perempuan Pilihan (Rekonstruksi Makna Fazfar bi dhat al- Din Melalui Teori Mubadalah)	Rp. 24.000.000,-
25	Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I 197710302008011007 Drs. Khotib, M.Ag 196906082005011003	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pascasarjana	MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS MASJID MELALUI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS	Rp. 24.000.000,-
26	Dr. Hj. Sri Astutik, M.Si 195902051986032004 Dra. Psi. Mierrina., M.Si 196804132014112001	Pascasarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi	BIMBINGAN ISLAM SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN KEMATANGAN EMOSI REMAJA AWAL	Rp. 24.000.000,-
27	Muhammad Thoriqussuud, M.Pd 198011182009121002 Masna Hikmawati, MA 199104132020122024	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	ANALISA PEMBIMBINGAN PROPOSAL DAN SKRIPSI DI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA MELALUI PROGRAM SINAU DI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp. 24.000.000,-
28	Siti Asmiyah, S.Pd, M. TESOL Dr. 197704142006042003 Rizka Safriyani, M.Pd 198409142009122005 Drs.Muhtarom, Med.Grad Dip Tesol 196512201992031005	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	EFIKASI DIRI GURU MADRASAH DALAM MENYUSUN MATERI AJAR BERBASIS LITERASI	Rp. 24.000.000,-

29	<p>Itsna Syahadatud Dinurriyah, MA 197604122011012003</p> <p>Raudlotul Jannah, M. App. Ling 197810062005012004</p>	<p>Fakultas Adab dan Humaniora</p> <p>Fakultas Adab dan Humaniora</p>	<p>Maskulinitas versus Femininitas: Tradisi Matahari dan Tradisi Bulan pada Novel Brida Karya Paulo Coelho</p>	Rp. 24.000.000,-
30	<p>Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si 197911052007011019</p> <p>Saoki, SHI, MHI 197404042007101004</p>	<p>Fakultas Syariah dan Hukum</p> <p>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>	<p>Manajemen Aset Wakaf Menggunakan Metode Community-Based Management (CMB) Berbasis Platform Digital di Lembaga Wakaf dan Perguruan Tinggi Kota Malang</p>	Rp. 24.000.000,-
31	<p>Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.Si 197906302006041001</p> <p>Drs. Abd. Basyid, MM 196009011990031002</p>	<p>Fakultas Dakwah dan Komunikasi</p> <p>Fakultas Dakwah dan Komunikasi</p>	<p>EVALUASI PROGRAM MODERASI SOSIAL- KEAGAMAAN PADA FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA BLITAR DAN RUMAH MODERASI UNIVERSITAS HINDU NEGERI (UHN) BALI</p>	Rp. 24.000.000,-
32	<p>Dr. Hj. Musyarrofah, MHI 197106141998032002</p> <p>Drs. H. Muhammad Syarief, MH 202111001</p>	<p>Fakultas Ushuluddin dan Filsafat</p> <p>Fakultas Ushuluddin dan Filsafat</p>	<p>NORMATIFITAS ETIKA BERDISKUSI (Kajian Kontekstual Tematik al Qur'an)</p>	Rp. 24.000.000,-
33	<p>Dr. Agoes Moh. Moefad, SH, M.Si 197008252005011004</p> <p>Dr. Sokhi Huda, M.Ag. 196701282003121001</p> <p>Maulidatus Syahrotin Naqqiyah, S.I.Kom., M. Sos. B072021</p>	<p>Fakultas Dakwah dan Komunikasi</p> <p>Fakultas Dakwah dan Komunikasi</p> <p>Fakultas Dakwah dan Komunikasi</p>	<p>JARINGAN KOMUNIKASI DAKWAH DI MEDIA SOSIAL (MEMBACA PETA DAKWAH ERA MILLENNIAL)</p>	Rp. 24.000.000,-

34	Suyikno, S.Ag, MH 197307052011011001 Riza Multazam Luthfy 198611092019031008	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	REFORMULASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA DALAM MEMENUHI ASAS KEPASTIAN HUKUM	Rp. 24.000.000,-
35	Dr. Lilik Hamidah, S.Ag, M.Si 197312171998032002 Dr. Nikmah Hadiati Salisah, S.Ip, M.Si 197301141999032004	Pascasarjana Pascasarjana	Media Sosial dan Transformasi Komunikasi Keluarga pada masa Pandemi Covid-19 dan Transisi New Normal	Rp. 24.000.000,-
36	Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag 197004161995032002 Dr. Abd. Syakur, M.Ag 196607042003021001	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Dakwah dan Komunikasi	NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL TRADISI GANJUR: STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN BRONDONG DAN LAREN- KABUPATEN LAMONGAN-JAWA TIMUR	Rp. 24.000.000,-
37	Dedy Suprayogi, S.KM, M.KL 198512112014031002 T EGUH TARUNA UTAMA, ST, MT 201603319	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	DETEKSI KONTAMINASI MIKROPLASTIK PADA SUNGAI BAWAH TANAH DI KAWASAN KARST MALANG SELATAN	Rp. 24.000.000,-
38	Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I 197604162005011004 Hasan Mahfudh, M.Hum 198909202018031001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Manifestasi Toleransi Beragama di Desa Medowo Kediri; Telaah Pendekatan Interdisipliner	Rp. 24.000.000,-
39	Prof. Dr. Damanhuri, MA 195304101988031001 Dra. Ilun Muallifah, M.Pd 196707061994032001	Pascasarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	MITIGASI KONFLIK MELALUI INCLUSIVE TEACHING DI SEKOLAH ISLAM BALI BINA INSANI	Rp. 24.000.000,-
40	Mega Ayundya Widiastuti, M. Eng 198703102014032007 Muhamad Ratodi, M. Kes 198103042014031001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Optimalisasi Pengembangan Fasilitas Pondok Pesantren Ramah Lingkungan Berbasis Program Eco Pesantren	Rp. 24.000.000,-

41	Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si 197411102003121004 Dr. H. Ahmad Suyuthi, M.Ag., M.Si. 197407212006041001	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Transformasi Partai Politik: dari Konvensional ke Digital di Tingkat Lokal	Rp. 24.000.000,-
42	Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S. Sos, M.Si 197607182008012022 H. Ali Muhdi, M.Si 197206262007101005	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Adab dan Humaniora	GERAKAN EKOFEMINISME DALAM UPAYA PEMULIHAN DAMPAK SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN PASCA BENCANA (Studi di Wilayah Bencana Lumpur Lapindo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo)	Rp. 24.000.000,-
43	Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag 197111021995032001 Dr. Iksan, M.Pd.I 202111010	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Pascasarjana	RELASI AGAMA DAN SAINS DI PESANTREN: STUDI MOTIVASI PELAKSANAAN HAUL DARING DI PESANTREN LANGITAN TUBAN DAN AL FITHRAH SURABAYA	Rp. 24.000.000,-
44	Al Qudus Nofiandri Eko Sucipto Dwijo, Lc, MHI 197311162007101001 Drs. Saefullah Azhari, Lc. M.Pd.I 196508141997031001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	KONTRA RADIKALISME MELALUI KONSTRUKSI AJARAN ISLAM WASATHIYAH BERBASIS AL-QURAN DI PESANTREN RAUDHATUL HUFFADZ TABANAN BALI	Rp. 24.000.000,-
45	Nova Lusiana, M. Keb 198111022014032001 Eva Agustina, M.Si 198908302014032008 Risa Purnamasari, S. Si, M. Si 201409002	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Bioaktivitas isolate katekin dari ekstrak Gambir (Uncaria gambir) terhadap viabilitas Cell Line Hepatoma secara in vitro	Rp. 24.000.000,-

46	Sarita Oktorina, M. Kes 198710052014032003 Indri Sudanawati Rozas, M. Kom 198207212014032001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Analisis Faktor Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir di Kab. Bima (Studi Kasus Desa Leu dan Desa Tambe)	Rp. 24.000.000,-
47	Aun Falestien Faletahan, MHRM 198205142005011001 Drs. Syaifudin Zuhri, M.Si 196610242014111001	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Nilai-Nilai Kekeluargaan Dan Kebahagiaan Dalam Manajemen Relawan: Studi Retensi Volunteer Di Organisasi Nirlaba Berbasis Agama	Rp. 24.000.000,-
48	Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH 198905172015031006 Sukamto, SH, MS 196003121999031001	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Dialektika Volksgeist dan Social Engineering Dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Rp. 24.000.000,-
49	Agus Solikin, M.S.I 198608162015031003 Adi Damanhuri 198611012019031010	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Korelasi Dan Signifikansi Antara Level Malam Dengan Solusi Titik Belok Pada Observasi Awal Waktu Shubuh Menggunakan Sky Quality Meter	Rp. 24.000.000,-
50	M. Anis Bachtiar, M.Fil.I 196912192009011002 Rozaqul Arif, M.Sos.I 198210122015031004	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Implikasi Mata Kuliah Psikolinguistik, Neurolinguistik dan Sociolinguistik (psikoneurosociolinguistik) terhadap Kompetensi Publik Speaking Lulusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA.	Rp. 24.000.000,-
51	Dr. Arbaiyah YS, MA 196405031991032002 Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag 197303202005012003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Penguatan Pendidikan Karakter mengembangkan Kepribadian utama entitas Individualiteit dalam Perspektif Pendidikan Holistik dan Merdeka Belajar	Rp. 24.000.000,-
52	Dr. H. Munawir, M.Ag 196508011992031005 Syafuruddin Faisal Thohar, M.Psi., Psikolog 198505092020121008	Fakultas Tarbiyah & Keguruan Fakultas Psikologi & Kesehatan	Pengembangan Model Inseri Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Pada Madrasah Aliyah Di Propinsi Jawa Timur	Rp. 24.000.000,-

53	Dr. Muwahid, SH, M.Hum 197803102005011004 Atok Syihabuddin, Shi., MEI 201603317	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Role Model Deradikalisasi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Jawa Timur (Studi Kasus di UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)	Rp. 24.000.000,-
54	Dr. A. Dzo'ul Milal, M.Pd 196005152000031002 Dr. Wahyu Kusumajanti, M.Hum 197002051999032002 SUFU IKRIMA SAADAH 201603318	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	Pembelajaran Sastra Bahasa Inggris: Strategi, Materi, Dan Efektifitasnya Terhadap Kompetensi Mahasiswa	Rp. 24.000.000,-
55	Dr. H. Sunarto AS, MEI 195912261991031001 Mochammad Andre Agustianto, Lc., M.H 199008112019031007	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Santripreneur dan Kemadirian Pesantren: Korelasi Manajemen Pendidikan Kewirausahaan dan Bisnis Kopi (Studi Multi Kasus di PP Al-Azhar Banyuwangi dan PP Mukmin Mandiri Sidoarjo)	Rp. 24.000.000,-

REKTOR/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



MASDAR HILMY



1